

**PENGARUH JUMLAH PENDUDUK, PENDIDIKAN,
DAN UPAH MINIMUM TERHADAP TINGKAT
PENGANGGURAN DI PROVINSI LAMPUNG
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI
ISLAM PERIODE 2010-2022**

Skripsi

RISKA SALSABILA

NPM: 1951010176



**Program Studi Ekonomi Syari'ah
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

**PENGARUH JUMLAH PENDUDUK,
PENDIDIKAN DAN UPAH MINIMUM
TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN DI
PROVINSI LAMPUNG DALAM PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM PERIODE 2010-2022**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu
Ekonomi Syari'ah**

Oleh

RISKA SALSABILA

NPM. 1951010176

Jurusan: Ekonomi Syari'ah

Pembimbing I : DR. H. Nasrudin, M.Ag

Pembimbing II: Gustika Nurmalia, S.El., M.EK

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2023 M**

ABSTRAK

Pengangguran merupakan orang yang telah masuk dalam angkatan kerja 15-64 tahun baik yang sedang mencari pekerjaan dan yang belum mendapatkan pekerjaan. Masalah pengangguran disebabkan karena adanya kesenjangan antara pencari kerja dan kesempatan kerja, kurangnya keahlian yang dimiliki oleh pencari kerja. Berdasarkan data jumlah pengangguran di pulau sumatera pada 10 provinsi di tahun 2022 Provinsi Lampung berada di urutan ke-8 terendah di Pulau Sumatera.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk, pendidikan dan upah minimum terhadap tingkat pengangguran baik secara parsial maupun simultan, serta bagaimana pengangguran di Provinsi Lampung dalam perspektif ekonomi Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan data sekunder dalam pengamatan 2010-2022. Pengumpulan data sekunder menggunakan metode dokumentasi untuk data laporan jumlah penduduk, pendidikan, upah minimum dan pengangguran dari BPS yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan regresi linear berganda dengan menggunakan program komputer *evIEWS 9*.

Dari hasil penelitian ini secara parsial Jumlah Penduduk (X_1) $0.0060 < 0,05$ Sehingga dapat disimpulkan bahwa Jumlah Penduduk berpengaruh signifikan terhadap Pengangguran di provinsi Lampung, Kemudian Pendidikan (X_2) tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengangguran di Provinsi Lampung karena nilai prob $0.6453 > 0,05$, Upah Minimum (X_3) berpengaruh signifikan terhadap Pengangguran karena nilai prob sebesar $0,0374$ lebih kecil dari $0,05$ ($0.0361 < 0,05$). Kemudian secara keseluruhan hasil analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis dapat disimpulkan bahwa penelitian ini secara simultan (Uji F) Jumlah Penduduk, Pendidikan dan Upah Minimum berpengaruh signifikan terhadap Pengangguran karena hasil Prob. (F-Statistic) sebesar $0.009625 < 0,05$.

Kata Kunci : Pengangguran, Jumlah Penduduk, Pendidikan dan Upah

SURAT PERTANYAAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Riska Salsabila
NPM : 1951010176
Jurusan/Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan, dan Upah Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam Periode 2010-2022” adalah benar hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar rujukan. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung, 09 November 2023

Penulis



Riska Salsabila

NPM. 1921020633



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratin Sukarame Bandar Lampung, 35131 Telp: (0721) 704030

PERSETUJUAN

JUDUL SKRIPSI: "PENGARUH JUMLAH PENDUDUK, PENDIDIKAN,
DAN UPAH MINIMUM TERHADAP TINGKAT
PENGANGGURAN DI PROVINSI LAMPUNG
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM PERIODE
2010-2022."

NAMA : Riska Salsabila

NPM : 1951010176

JURUSAN : Ekonomi Syariah

FAKULTAS : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk Disidangkan Dan Dipertahankan Dalam Sidang Munaqasyah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Nasruddin, M.Ag.

NIP. 195809241990031003


Gustika Nurmalia, S.E.I., M.Ek.

NIP. 2014080919890708133

Mengetahui,

Ketua Prodi Studi Ekonomi Syariah


Dr. Erike Angerjani, M.E., Sy.

NIP. 198208082011012009



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame Bandar Lampung, 35131 Telp: (0721) 704030

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan, dan Upah Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam" disusun oleh Riska Salsabila NPM 1951010176 program studi Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam sidang munaqosah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung: Kamis, 07 Desember 2023.

TIM MUNAQOSAH

Ketua : Nurlaili, S.Ag., M.A

Sekretaris : Oza Restianita, M.E

Penguji Utama : Ersi Sisdianto, S.E.I., M.Ak

Penguji Pendamping I : Dr. H. Nasruddin, M.Ag.

Penguji Pendamping II : Gustika Nurmalia, S.EI., M.Ek

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Prof. Dr. Tulus Suryanto, S.E., M.M., Akt., C.A.



18/12/2023 09262008011000

MOTTO

اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۖ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي
أَنَاءِ آخِرَةٍ إِلَّا مَتَاعٌ

"Allah meluaskan rezeki dan menyempitkannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan di dunia, padahal kehidupan dunia itu (dibanding dengan) kehidupan akhirat, hanyalah kesenangan (yang sedikit)"

{Q.S Ar-Ra'd (13) : (26)}

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur Kepada Allah SWT dan dari hati yang terdalam, penulisan skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya Bapak Roby Kurniawan dan Ibu Dian Siska. Yang saya hormati dan saya banggakan. Selalu menguatkan saya sepenuh jiwa raga, merawat, dan memotivasi saya dengan nasehat-nasehat yang luar biasa, serta mendoakan saya agar selalu ada dalam jalan-Nya. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT dan keberkahan dalam setiap langkahnya.
2. Kakak saya, Muhammad Rian Pratama yang senantiasa selalu memberi semangat dan mendoakan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Almamaterku tercinta tempat saya menimba ilmu yaitu UIN Raden Intan Lampung. Semoga selalu jaya, maju, berkualitas dan menjadi PTKIN terdepan di Indonesia.
4. Teman-teman seperjuangan jurusan Ekonomi Islam angkatan 2019 yang tak henti-hentinya memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.

RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Riska Salsabila
Tempat, Tanggal Lahir : Bandar Lampung, 09 Desember
2001
Alamat : Jl. Martadinata no. 21 Pesawahan
Kecamatan : Teluk Betung Selatan, Bandar
Lampung
Nama Ayah : Robi Kurniawan
Nama Ibu : Dian Siska
Telepon : 08993599002
E-mail : riskaasalsabill@gmail.com

B. Data Pribadi

2006-2007 : TK Pertiwi
2007-2013 : SDN 2 Rawa Laut
2012-2016 : SMPN 4 Bandar Lampung
2016-2019 : SMAN 3 Bandar Lampung
2019-2023 : UIN Raden Intan Lampung

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul **Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan dan Upah Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran Di Provinsi Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam Periode 2010-2022** Dapat diselesaikan. Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. para sahabat, dan pengikut-pengikutnya yang setia. Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh penyelesaian skripsi ini. Penyelesaian skripsi ini tidak akan terlaksana tanpa adanya bantuan, kerjasama, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Madnasir, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan mahasiswa.
2. Ibu Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy selaku Ketua Jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
3. DR. H. Nasrudin, M.Ag selaku pembimbing I yang senantiasa tulus dan sabar telah meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Gustika Nurmalia, M.Ek Selaku Pembimbing II yang senantiasa sabar dan tulus dalam memberikan arahan, tambahan ilmu serta motivasi kepada penulis hingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu serta motivasi yang bermanfaat kepada penulis hingga dapat menyelesaikan studi.

6. Pimpinan dan karyawan perpustakaan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut, serta perpustakaan daerah yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.
7. Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung, yang telah membantu penulis dalam mendapatkan data-data penelitian serta memberikan penjelasan mengenai data-data tersebut.
8. Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, yang telah membantu penulis dalam mendapatkan data-data penelitian serta memberikan penjelasan mengenai data-data tersebut.
9. Sahabat seperjuangan khususnya kelas B Jurusan Ekonomi Syariah, angkatan 2019 yang selalu bersama selama proses perkuliahan serta memberikan dukungan dan semangat.
10. Pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberikan masukan serta inspirasi bagi penulis.

Peneliti menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan hal tersebut dikarekan adanya keterbatasan waktu, dana, kemampuan yang peneliti miliki. Untuk itu para pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran guna melengkapi hasil penelitian ini. Peneliti berharap hasil penelitian ini akan menjadi sumbangan yang berarti dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Khususnya ilmu ekonomi islam.

Bandar Lampung, 01 Oktober 2022

Penulis,

Riska Salsabila
NPM. 1951010176

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GRAFIK	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang	2
C. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	11
D. Rumusan Masalah	11
E. Tujuan Penelitian	11
F. Manfaat Penelitian	12
G. Kajian Penelitian Yang Terdahulu yang Relevan	13
H. Sistematika Penulisan	16

BAB II LANDASAN TEORI

A. Jumlah Penduduk	19
1. Pengertian Penduduk	19
2. Teori-Teori Kependudukan	20
3. Penduduk Dalam Ekonomi Islam	23
4. Pemberdayaan Penduduk	24
5. Dampak Pertumbuhan Penduduk	25
B. Pendidikan.....	27
1. Pengertian Pendidikan	27
2. Jalur Pendidikan	28
3. Tingkat Pendidikan	29

4.	Pendidikan Dalam Perspektif Islam	30
C.	Upah.....	31
1.	Pengertian dan Dasar Hukum Upah	31
2.	Teori-Teori Upah	33
3.	Upah Dalam Ekonomi Islam	36
4.	Jenis-Jenis Upah	38
5.	Penetapan Upah Minimum	39
6.	Tujuan Pengupahan.....	39
D.	Pengangguran.....	40
1.	Pengertian pengangguran	40
2.	Faktor penyebab pengangguran	41
3.	Teori pengangguran	42
4.	Jenis-jenis pengangguran	43
5.	Dampak pengangguran `	45
E.	Kerangka Berpikir	47
F.	Hipotesis Penelitian	47

BAB III METODE PENELITIAN

A.	Metode pendekatan penelitian	51
B.	Jenis dan sumber data	52
C.	Metode pengumpulan data.....	52
D.	Populasi dan sampel	53
E.	Definisi variabel penelitian.....	54
F.	Tehnik pengolahan dan analisis data	54

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A.	Gambaran Umum Provinsi Lampung	59
1.	Sejarah singkat propinsi lampung	59
2.	Letak geografis provinsi lampung	59
3.	Tinjauan ekonomi di provinsi lampung.....	59
4.	Sarana dan prasarana di provinsi lampung	60
B.	Analisis Data	62
1.	Analisis deskriptif	62
2.	Uji asumsi klasik.....	66
3.	Regresi linier berganda	69
4.	Hasil Uji Hipotesis	71
C.	Pembahasan	74

1. Pengaruh simultan jumlah penduduk, pendidikan dan upah minimum terhadap pengangguran di provinsi lampung tahun 2010-2022.....	75
2. Pengaruh Pendidikan terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Lampung Tahun 2010-2022.....	76
3. Pengaruh Upah Minimum terhadap Pengangguran di Provinsi Lampung Tahun 2010-2022.....	77
4. Pengaruh Jumlah Penduduk, Jumlah Penduduk dan Upah Minimum terhadap Tingkat Pengangguran dalam Perspektif Ekonomi Islam	78

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	81

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1.1 Presentase Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Sumatera Periode 2017-2022	4
2. Tabel 1.2 Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung 2017-2022	5
3. Tabel 3.1 Definisi Variabel Penelitian	54
4. Tabel 4.1 Jumlah Penduduk di Provinsi Lampung Tahun 2010-2022	63
5. Tabel 4.2 Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Provinsi Lampung Tahun 2010-2022 (Persen).....	64
6. Tabel 4.3 Upah Minimum Kota Bandar Lampung (Rupiah) Tahun 2010-2022	64
7. Tabel 4.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Lampung (Jiwa) Tahun 2010-2022	65
8. Tabel 4.5 Uji Normalitas	67
9. Tabel 4.6 Hasil Uji Multikolinieritas	68
10. Tabel 4.7 Uji Heteroskedastisitas	68
11. Tabel 4.8 Hasil Uji Autokorelasi	69
12. Tabel 4.9 Uji Regresi Linier Berganda	70
13. Tabel 4.10 Hasil Uji F	71
14. Tabel 4.11 Hasil Uji T	73
15. Tabel 4.12 Koefisien Determinasi (R^2)	74

DAFTAR GRAFIK

Grafik1.1	Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Provinsi Lampung tahun 2010-2022.....	6
Grafik1.2	Jumlah penduduk di Provinsi Lampung tahun 2010-2022.....	8
Grafik1.3	Rata-rata lama sekolah (RLS) di Provinsi Lampung tahun 2010-2022.....	9
Grafik1.4	Upah minimum di Provinsi Lampung tahun 2010-2022.	10

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul, “Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan, dan Upah Terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam Periode 2010-2022”. Untuk ini perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah judul sebagai berikut:

1. Pengaruh

Pengaruh dalam istilah penelitian disebut dengan akibat asosiatif yaitu suatu penelitian yang mencari atau pertautan nilai antara satu variabel dengan variabel yang lain.¹

2. Jumlah penduduk

Jumlah Penduduk adalah sejumlah orang yang sah yang mendiami suatu daerah atau negara serta mentaati ketentuan-ketentuan dari daerah atau negara tersebut.²

3. Pendidikan

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk memberikan bimbingan atau pertolongan dalam mengembangkan potensi jasmani dan rohani yang diberikan oleh orang dewasa kepada peserta didik untuk mencapai kedewasaannya serta mencapai tujuan agar peserta didik mampu melaksanakan tugas hidupnya secara mandiri.³

4. Upah

Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan-undangan, termasuk tunjangan

¹ Sugiyono, *Penelitian Administratif* (Bandung: Alfabeta, 2011), 7.

² Makdalena Asmuruf, “Pengaruh Pendapatan dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Sorong, (*Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15.5 2015).

³ Rahmat Hidayat dan Abdillah, *Ilmu Pendidikan (Konsep, Teori dan Aplikasinya)* (Medan:LPPPI,2019), 24.

bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.⁴

5. Pengangguran

Pengangguran adalah orang yang telah masuk dalam angkatan kerja 15-64 tahun baik yang sedang mencari pekerjaan dan yang belum mendapatkan pekerjaan.⁵

6. Periode

Periode merupakan kurun waktu atau lingkaran waktu atau masa⁶.

7. Perspektif Ekonomi Islam

Ekonomi islam adalah sebuah sistem ilmu pengetahuan yang menyoroti masalah perekonomian. Sama seperti konsep ekonomi konvensional lainnya. Hanya saja dalam sistem ekonomi ini, nilai-nilai Islam menjadi landasan dan dasar dalam setiap aktifitasnya.⁷

Berdasarkan uraian dari istilah-istilah diatas, maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud judul dari skripsi ini adalah bagaimana **“Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan, dan Upah Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Lampung Periode 2010-2022 dalam Perspektif Ekonomi Islam”**.

B. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan sebuah negara yang tidak terlepas dari berbagai permasalahan ekonomi, yang menjadi salah satu dari permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh negara Indonesia adalah masalah pengangguran. Pengangguran merupakan permasalahan krusial yang tidak akan pernah habis untuk diperbincangkan. Pengangguran yang tinggi akan berdampak pada

⁴ Pasal 1 Ayat (30) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

⁵ Amir Machmud, *Perekonomian Indonesia Pasca Reformasi*, ed. oleh Suryadi Saat (Jakarta: Erlangga, 2016), 240.

⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 860.

⁷ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2011), 14.

pertumbuhan ekonomi suatu negara khususnya negara yang sedang berkembang seperti Indonesia.⁸ Pengangguran merupakan suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya.⁹

Masalah pengangguran disebabkan karena adanya kesenjangan antara pencari kerja dan kesempatan kerja, dimana jumlah angkatan kerja atau pencari yang tidak dibarengi dengan peningkatan kesempatan kerja sehingga tidak dapat didistribusikan ke lapangan pekerjaan.¹⁰ Selain itu, kurangnya informasi dimana pencari kerja tidak memiliki akses untuk mencari informasi tentang perusahaan yang kekurangan tenaga kerja dan kurangnya keahlian yang dimiliki oleh pencari kerja menjadi penyebab tingginya angka pengangguran.¹¹

Tingkat pengangguran yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan kekacauan politik keamanan dan sosial sehingga mengganggu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Akibat dari jangka panjang adalah menurunnya GNP dan pendapatan perkapita suatu negara. Di pulau Sumatera terdapat kesenjangan antara kesempatan kerja dengan angkatan kerja terjadi karena peningkatan jumlah kesempatan kerja tidak sebanding dengan peningkatan angkatan kerja yang meningkat lebih cepat, hal ini akan berdampak pada terciptanya pengangguran.¹² Hal tersebut dapat kita lihat pada kondisi perkembangan tingkat pengangguran di Pulau Sumatera dibawah ini :

⁸ K Ishak, *Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Pengangguran Dan Inflikasinya Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia*, 2018.

⁹ Sukirno Sadono, *Makroekonomi Teori Pengantar* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008).

¹⁰ Humaidah Muafiqie, et al, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Pendekatan Makro dan Mikro)* (Selat Media), 82.

¹¹ Riska Franita, Andes Fuady Dharma Harahap, and Yani Sukriah, 'Analisa Pengangguran Di Indonesia', *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 6.1 (2019), 88-91.

¹² Statistik Indonesia, Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung

Tabel 1.1
Presentase Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi
Sumatera Periode 2017-2022

No	Provinsi	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Aceh	6,57	6,34	6,17	6,59	6,30	6,17
2.	Kepulauan Riau	7,16	8,04	7,50	10,34	9,91	8,23
3.	Riau	6,22	5,98	5,76	6,32	4,42	4,37
4.	Sumatera Utara	5,60	5,55	5,39	6,91	6,33	6,16
5.	Sumatera Barat	5,58	5,66	5,38	6,88	6,52	6,28
6.	Sumatera Selatan	4,39	4,27	4,53	5,51	4,98	4,63
7.	Lampung	4,33	4,04	4,03	4,67	4,69	4,52
8.	Jambi	3,87	3,73	4,06	5,13	5,09	4,59
9.	Bangka Belitung	3,78	3,61	3,58	5,25	5,03	4,77
10.	Bengkulu	3,74	3,35	3,26	4,07	3,65	3,59

Sumber : BPS Provinsi Sumatera 2022

Dari tabel di atas menyatakan bahwa presentase jumlah pengangguran terbuka di pulau sumatera pada 10 provinsi mengalami fluktuasi dan berbeda-beda antara provinsi dari tahun 2017-2022. Provinsi Lampung pada tahun 2017 tingkat pengangguran pada peringkat 7 sebesar 4,33% dan terendah Provinsi Bengkulu sebesar 3,74%, Provinsi Lampung pada tahun 2018 tingkat pengangguran pada peringkat 7 sebesar 4,04% dan terendah Provinsi Bangka Belitung sebesar 3,35, Provinsi Lampung pada tahun 2019 tingkat pengangguran pada peringkat 8 sebesar 4,03% dan terendah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 3,26%. Provinsi Lampung pada tahun 2020 tingkat pengangguran pada peringkat 9 sebesar 4,67% dan terendah Provinsi Bengkulu sebesar 4,07%. Provinsi Lampung pada tahun 2021 tingkat pengangguran pada peringkat 8 sebesar 4,69% dan terendah Provinsi Bengkulu sebesar 3,65%. Provinsi Lampung pada tahun 2022 tingkat pengangguran pada peringkat 8 sebesar 4,52% dan terendah Provinsi Bengkulu sebesar 3,59%. Dalam kurun waktu enam tahun nilai persentase di Provinsi Lampung mengalami penurunan pengangguran tetapi mengalami perubahan peringkat, dimana peringkat tertinggi pada tahun 2021 yaitu pada

peringkat 8 dengan persentase 4,69 dan terendah tahun 2019 sebesar 4,03%.

Orang yang menganggur dapat didefinisikan orang yang tidak bekerja dan secara aktif mencari pekerjaan selama 4 minggu sebelumnya, sedang menunggu panggilan kembali untuk suatu pekerjaan setelah diberhentikan atau sedang menunggu untuk melapor atas pekerjaan yang baru dalam waktu 4 minggu.¹³ Teori makro ekonomi, masalah pengangguran dibahas pada dasar tenaga kerja yang juga dihubungkan dengan keseimbangan antara tingkat upah tenaga kerja. Upaya menurunkan tingkat pengangguran dan menurunkan tingkat kemiskinan adalah sama pentingnya. Terjadinya pengangguran akan menyebabkan terjadinya kenaikan jumlah kemiskinan, menurunkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Berikut adalah kondisi tingkat pengangguran terbuka kabupaten/kota di provinsi Lampung periode 2017-2022

Tabel 1.2
Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka
Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung 2017-2022

No	Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Lampung Barat	0,96	2,76	1,68	2,13	2,83	2,10
2	Tanggamus	5,08	2,23	2,98	2,96	2,93	3,70
3	Lampung Selatan	4,80	4,49	4,75	5,19	5,27	5,31
4	Lampung Timur	3,80	3,38	2,89	2,64	3,05	3,30
5	Lampung Tengah	3,08	2,52	2,62	4,22	4,31	3,56
6	Lampung Utara	5,62	4,87	5,09	5,34	6,14	6,15
7	Way Kanan	2,88	4,45	3,60	3,56	3,36	3,28
8	Tulang Bawang	3,47	3,53	4,04	4,84	4,10	3,52
9	Pesawaran	5,73	4,64	4,42	4,64	4,19	5,06
10	Pringsewu	4,63	4,13	4,95	5,77	4,85	4,77
11	Mesuji	0,65	3,80	3,62	3,71	3,42	3,22
12	Tulang Bawang Barat	1,83	2,93	3,59	3,46	3,35	4,12
13	Pesisir Barat	2,71	1,87	3,25	3,41	3,08	3,73
14	Bandar Lampung	8,1	7,28	7,12	8,79	8,85	7,91
15	Metro	4,64	5,79	5,11	5,40	5,00	4,34

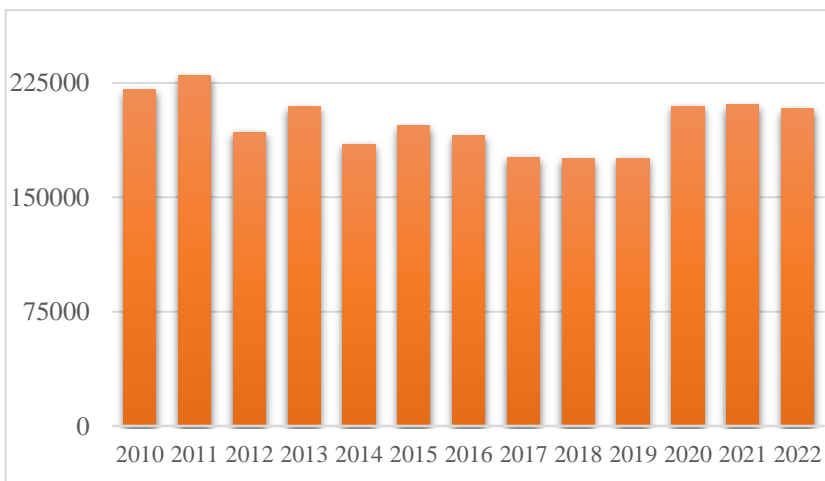
Sumber : Data Olah pada BPS Provinsi Lampung

¹³ Sandy Dharmakusuma, *Trade Off Antara Inflasi Dan Tingkat Pengangguran* (Gema Stikubank).

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa kondisi tingkat pengangguran dari tahun 2017-2022 di provinsi lampung dalam kurun waktu 6 tahun terakhir mengalami fluktuasi terhadap kabupaten/kota yang berbeda-beda dilihat pada tahun 2017-2022 tingkat pengangguran terbuka tertinggi terdapat di kota Bandar lampung pada tahun 2021 sebesar 8,85%. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka terendah terdapat di kabupaten/kota Mesuji pada tahun 2017 yaitu sebesar 0,65%.

Masalah pengangguran menjadi permasalahan serius yang memberikan dampak terhadap individu maupun perekonomian suatu daerah, khususnya di Kota Bandar Lampung. Berdasarkan data jumlah penduduk angkatan kerja dan jumlah penduduk bekerja maka diperoleh jumlah pengangguran di Kota Bandar Lampung tahun 2012 sampai dengan tahun 2022 yang dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 1.1
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Lampung
Tahun 2010-2022



Sumber: BPS Provinsi Lampung 2010-2022

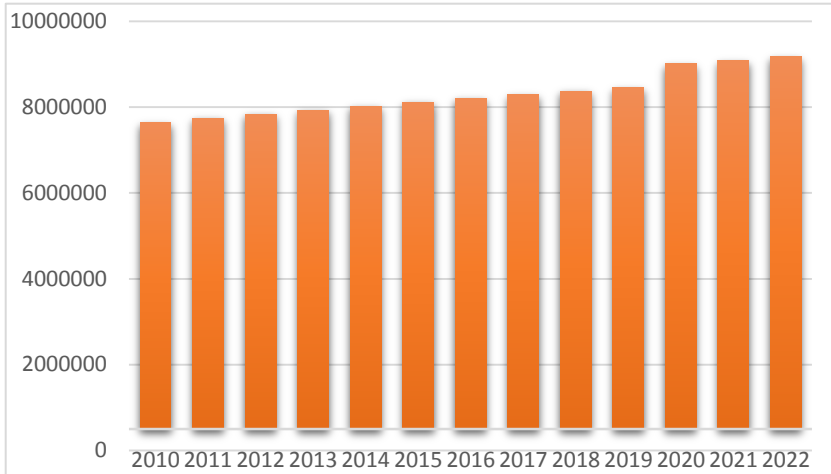
Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa jumlah pengangguran di Provinsi Lampung mengalami fluktuasi dari tahun 2010 sampai tahun 2022, keadaan seperti ini diasumsikan

dapat mempengaruhi perekonomian di Provinsi Lampung tahun 2010-2022. Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah pengangguran di Provinsi Lampung pada tahun 2011 mengalami kenaikan sebesar 8.985 jiwa. Jumlah pengangguran di Provinsi Lampung pada tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 36.861 jiwa. Jumlah pengangguran di kota Bandar Lampung pada tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 16.739 jiwa. Selama kurun waktu tiga belas tahun terakhir jumlah pengangguran tertinggi di kota Bandar Lampung terjadi pada tahun 2011 sebesar 229.604 jiwa dan Jumlah pengangguran terkecil di kota Bandar Lampung terjadi pada tahun 2018 sebesar 175.505 jiwa.

Pengangguran bukanlah permasalahan yang muncul begitu saja, tetapi didalamnya terdapat variabel yang mempengaruhi termasuk permasalahan jumlah penduduk. Ketika berbicara tentang pengangguran berarti berbicara tentang angkatan kerja. Jumlah penduduk yang bertambah juga akan berimbas pada penambahan jumlah angkatan kerja. Kenaikan yang menambah jumlah angkatan kerja ini apabila tidak dibarengi dengan penambahan lapangan kerja maka akan menambah pengangguran.¹⁴ Adapun jumlah penduduk tahun 2010-2022 dapat dilihat pada grafik berikut:

¹⁴ Muhammad Baihaki Hani Gufon and Yuni Prihadi Utomo, 'Analisis Pengaruh Upah Minimum, Pdrb, Jumlah Penduduk Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Jumlah Pengangguran Di Jawa Timur Tahun 2018' (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020).

Grafik 1.2
Jumlah Penduduk di Provinsi Lampung
Tahun 2010-2022



Sumber: BPS Provinsi Lampung 2010-2022

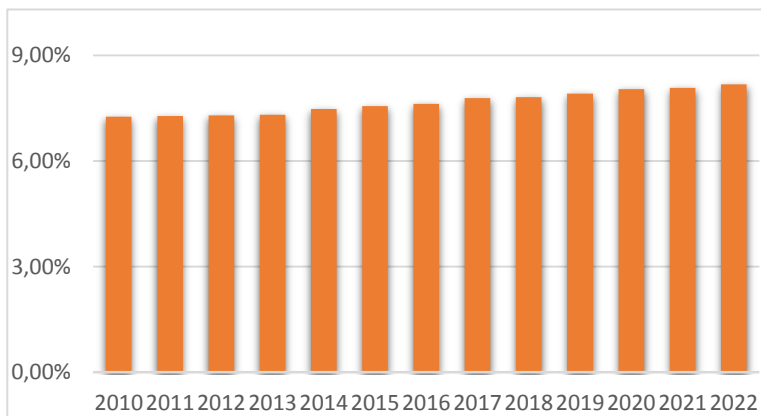
Tabel di atas menunjukkan jika Kota Bandar Lampung dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan pertumbuhan penduduk per tahun. Kenaikan tingkat jumlah penduduk di Kota Bandar Lampung pada 2020 terbilang tertinggi mencapai 560.111 jiwa ini menunjukkan bahwa kenaikan tersebut akan berdampak terhadap tingkat pengangguran jika penduduk tidak mempunyai kapasitas tinggi untuk menghasilkan dan menyerap produksinya.

Selain pertambahan jumlah penduduk yang harus dibarengi dengan perluasan lapangan kerja, pertambahan ini juga harus diiringi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia.¹⁵ Kualitas sumber daya manusia dapat diukur dari tingkat pendidikan. Seseorang yang memiliki 4 pendidikan yang tinggi tentunya memiliki keahlian dan kemampuan yang tinggi juga. Dengan keahlian dan kemampuan yang dimiliki akan mempermudah untuk bekerja, sebab untuk mendapatkan pekerjaan dibutuhkan pendidikan dan keahlian dari calon pekerja

¹⁵ Ibid

agar bisa terserap dalam dunia kerja yang pada akhirnya akan mengurangi tingkat pengangguran.¹⁶

Grafik 1.3
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Provinsi Lampung
Tahun 2010-2022



Sumber : BPS Provinsi Lampung

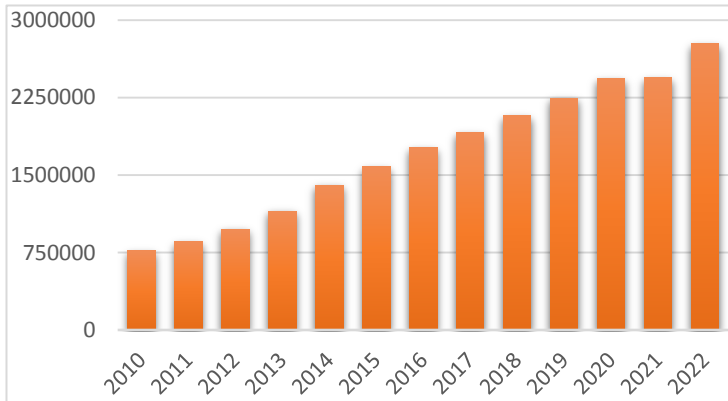
Berdasarkan tabel 1.4 dapat dijelaskan bahwa rata-rata lama sekolah selalu mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Dapat dilihat dari rata-rata lama sekolah di Provinsi Lampung selalu mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. tahun 2010 dengan perkembangan sebesar 7,26 persen. Dan perkembangan rata-rata lama sekolah tertinggi di kota Bandar Lampung tahun 2022 dengan perkembangan sebesar 8,18 %.

Selain pendidikan, upah juga memiliki pengaruh terhadap jumlah pengangguran. Upah merupakan balas jasa yang diterima oleh pekerja atas pekerjaan yang telah dilakukan. Penetapan upah pada suatu daerah akan mempengaruhi tingkat pengangguran yang ada, upah akan mempengaruhi penawaran dan permintaan tenaga kerja. Penetapan upah yang rendah pada suatu daerah akan berdampak pada tingginya tingkat pengangguran yang ada. Sebaliknya ketika upah yang ditawarkan tinggi maka akan

¹⁶ Iswahyudi Joko Suprayitno, Moh Yamin Darsyah, and Ujiati Suci Rahayu, 'Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Jumlah Pengangguran Di Kota Semarang', in *PROSIDING SEMINAR NASIONAL & INTERNASIONAL*, 2017, 1.

mendorong angkatan kerja untuk mencari pekerjaan sehingga pengangguran akan berkurang.¹⁷

Grafik 1.4
Upah Minimum Provinsi Lampung
Tahun 2010-2022



Sumber : BPS Provinsi Lampung

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa tingkat upah minimum Provinsi Lampung selalu mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Di tahun 2010 tingkat upah minimum provinsi (UMP) Lampung yaitu sebesar 767.500 Rupiah dan di tahun 2022 tingkat ingkat upah minimum provinsi (UMP) Lampung yaitu sebesar 2.770.794 Rupiah. Artinya dalam kurun waktu 13 tahun terakhir tingkat upah minimum kota bandar lampung meningkat sebesar 2.003.294 Rupiah.

Berdasarkan permasalahan yang telah telah diuraikan,, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan, dan Upah Minimum Terhadap Pengangguran di Provinsi Lampung Tahun 2010-2022 Dalam Perspektif Ekonomi Islam”**.

¹⁷ Sofiatuz Zahroh Zahroh, “Analisis Pengaruh PDRB, Angkatan Kerja, dan Upah Minimum Terhadap Pengangguran Di Kota Malang,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 5.2 (2017).

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

- a. Jumlah penduduk yang selalu meningkat di Provinsi Lampung berdampak semakin sulitnya mencari lapangan kerja.
- b. Rendahnya tingkat pendidikan akan menyebabkan tingkat pengangguran di Provinsi Lampung menjadi tinggi.
- c. Tingkat upah yang rendah membuat pekerja kurang produktif dalam bekerja.
- d. Meningkatnya pengangguran akan menyebabkan perekonomian di Provinsi Lampung menurun.

2. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah tingkat pengangguran di Provinsi Lampung dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu jumlah penduduk, pendidikan, dan upah, kemudian periode tahun yang digunakan yaitu tahun 2010-2022. Dan dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung 2010-2022.

D. Rumusan Masalah

1. Apakah jumlah penduduk berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Lampung tahun 2010-2022?
2. Apakah pendidikan berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Lampung tahun 2010-2022?
3. Apakah upah dapat berpengaruh terhadap pengangguran di Provinsi Lampung Tahun 2010-2022?
4. Apakah jumlah penduduk, pendidikan, dan upah terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Lampung tahun 2010-2022 dalam perspektif ekonomi islam?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana jumlah penduduk berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Lampung tahun 2010-2022
2. Untuk mengetahui bagaimana pendidikan berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Lampung tahun 2010-2022
3. Untuk mengetahui bagaimana upah dapat berpengaruh terhadap pengangguran di Provinsi Lampung Tahun 2010-2022
4. Untuk mengetahui bagaimana jumlah penduduk, pendidikan, dan upah terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Lampung tahun 2010-2022 dalam ekonomi islam

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang hendak dicapai, diantaranya sebagai berikut:

1. Aspek Keilmuan (Teoritis)

Diharapkan dapat menambahkan pengetahuan tentang pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan, dan Upah terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Lampung dalam perspektif ekonomi Islam periode 2010-2022.
2. Aspek terapan (Praktis)
 - a. Bagi Peneliti, menambah wawasan tentang pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan, Kesempatan Kerja dan Upah terhadap Tingkat Pengangguran. Penelitian ini digunakan untuk mengimplementasikan atau menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan.
 - b. Bagi Akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan dan sebagai rujukan tambahan referensi atau perbandingan penelitian selanjutnya bagi bidang studi Ekonomi Syariah.
 - c. Bagi Praktisi, menjadi bahan informasi, manfaat dan mengetahui Jumlah Penduduk, Pendidikan, dan Upah terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Lampung Periode 2010-2022.

- d. Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat menjadikan input dan dasar pertimbangan bagi pemerintah untuk menentukan kebijakan yang mengarah terhadap penurunan tingkat pengangguran.

G. Kajian Penelitian Yang Terdahulu yang Relevan

Untuk menunjang pembahasan dalam menjawab permasalahan, peneliti menelusuri sejumlah Literatur serta penelitian terdahulu yang sejalan terhadap masalah yang dibahas dalam penelitian ini agar dapat digunakan untuk membandingkan dan menjadi acuan yang menggambarkan hasil-hasil penelitian terdahulu sehingga penelitian terdahulu sangat bermanfaat dalam penelitian ini. Adapun yang sesuai dengan hasil eksplorasi dari penelusuran ditemukan sejumlah penelitian terdahulu yang relevan dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Viky Mouren, Agnes Lutherani Ch. P. Lopian , Steeva Y.L Tumangkeng dalam jurnal Berkala Ilmiah Volume 22 No.5 yang berjudul "Pengaruh tingkat pendidikan, pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk terhadap pengangguran di Kabupaten Toraja Utara".¹⁸

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengangguran di Kabupaten Toraja Utara tahun 2010-2021, sedangkan untuk jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran di Kabupaten Toraja Utara. Secara simultan tingkat pendidikan, pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Toraja Utara tahun 2010-2021.

Sedangkan perbedaan penelitian yaitu pada penelitian ini penulis menambahkan upah minimum sebagai variabel bebas. Selanjutnya perbedaan pada objek penelitian yang penulis lakukan pada Provinsi Lampung.

¹⁸ Viky Mouren, Agnes Lutherani Ch P Lopian, dan Steeva Y L Tumangkeng, "Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah Penduduk Terhadap Pengangguran Di Kabupaten Toraja Utara," *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 22.5 (2022), 133–44.

2. Mukti Hadi Prasaja dalam *Economics Development Analysis Journal* yang berjudul "Pengaruh investasi asing, jumlah penduduk dan inflasi terhadap pengangguran terdidik di Jawa Tengah periode tahun 1980-2011."¹⁹

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel investasi asing berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran terdidik di Jawa Tengah, jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran terdidik di Jawa Tengah, inflasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pengangguran terdidik di Jawa Tengah. Variabel investasi asing, jumlah penduduk dan inflasi berpengaruh secara nyata terhadap pengangguran terdidik di Jawa Tengah.

Sedangkan perbedaan penelitian yaitu pada penelitian ini penulis menambahkan pendidikan, upah minimum sebagai variabel bebas. Selanjutnya perbedaan pada objek penelitian yang penulis lakukan pada Provinsi Lampung, serta periode penelitian yang penulis gunakan yaitu 2010-2022.

3. Rizka Febiana Putri dalam jurnalnya yang berjudul "Analisis pengaruh inflasi, pertumbuhan ekonomi dan upah terhadap pengangguran terdidik".²⁰

Hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan upah secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap pengangguran terdidik di Provinsi Jawa Tengah, inflasi berpengaruh negatif dan signifikan, pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan tidak signifikan, upah berpengaruh negatif dan signifikan.

Sedangkan perbedaan penelitian yaitu pada penelitian ini penulis menambahkan jumlah penduduk dan pendidikan sebagai variabel bebas.

¹⁹ Mukti Hadi Prasaja, "Pengaruh Investasi Asing, Jumlah Penduduk Dan Inflasi Terhadap Pengangguran Terdidik Di Jawa Tengah Periode Tahun 1980-2011," *Economics Development Analysis Journal*, 2.3 (2013).

²⁰ Rizka Febiana Putri, "Analisis pengaruh inflasi, pertumbuhan ekonomi dan upah terhadap pengangguran terdidik," *Economics Development Analysis Journal*, 4.2 (2015), 175-81.

4. Riza Firdhania, Fivien Muslihatinningsih dalam jurnal e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi, 2017, Volume IV (1) : 117-121 yang berjudul "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran di Kabupaten Jember"²¹

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Variabel inflasi, upah minimum, dan indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Jember. Sedangkan variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Jember.

Sedangkan perbedaan penelitian yaitu pada peneliti menambahkan jumlah penduduk dan pendidikan sebagai faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran.

5. Rangga Pramudjasi. T , Juliansyah , Diana Lestari dalam jurnal kinerja ekonomi dan manajemen Vol 16.1 (2019): 69-77 yang berjudul "Pengaruh jumlah penduduk dan pendidikan serta upah terhadap pengangguran di kabupaten paser"²²

Hasil penelitian menunjukkan Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran. Pendidikan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran. Upah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran

Sedangkan perbedaan penelitian yaitu pada objek penelitian penulis menggunakan data provinsi.

6. Meri Rahmania 2018 e-jurnal pendidikan ekonomi dan kewirausahaan Vol 1, No 2 yang berjudul “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pengangguran terdidik di Kota Padang.”²³ Hasil penelitian menunjukkan bahwa upah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penganggura

²¹ Riza Firdhania dan Fivien Muslihatinningsih, “Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran di Kabupaten Jember,” *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 4.1 (2017), 117–21.

²² Rangga Pramudjasi Tangke, Juliansyah Juliansyah, dan Diana Lestari, “Pengaruh jumlah penduduk dan pendidikan serta upah terhadap pengangguran di kabupaten paser,” *KINERJA*, 16.1 (2019), 69–77.

²³ Meri Rahmania and Efit tria Wulandari, “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pengangguran Terdidik Di Kota Padang”, *Eklektik: Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Kewirausahaan*, 1.2 (2018), 114-26.

terdidik di Kota Padang. Sedangkan perbedaan penelitian yaitu pada penelitian ini penulis menambahkan jumlah penduduk dan pendidikan sebagai variabel bebas. Serta periode penelitian yang digunakan oleh peneliti tersebut adalah 15 tahun, yaitu dari tahun 2001-2015.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab, yang masing-masing uraian secara garis besar dijelaskan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bab pendahuluan menjelaskan tentang penegasan dari judul penelitian yang berisi tentang istilah yang ada dalam judul agar tidak ada kekeliruan, latar belakang berisi tentang masalah pokok dari penelitian yang akan dianalisis, identifikasi an batasan masalah atau upaya pembatasan masalah agar lebih fokus, rumusan masalah berisi tentang permasalahan apa yang akan diselesaikan pada penelitian in. Tujuan penelitian berisi tentang hasil atau jawaban dari rumusan masalah dalam penelitan, manfaat penelitian berisi tentang manfaat secara praktis maupun teoritis dari penelitian yang menjadi dasar atau acuan penelitian serta berhubungan dengan penelitian ini, dan sistematika yang akan dijelaskan dengan singkat.

BAB II Landasan Teori

Pada bab ini menjelaskan tentang landasan teori, ini menjelaskan tentang teori yang terkait dengan penelitian, diantaranya teori Jumlah Penduduk, Upah dan Pengangguran, sehingga menjadi sumber pendukung dalam penelitian ini. Pengajuan hipotesis berisi jawaban sementara yang diajukan dalam penelitian yang perlu diuji kebenarannya dalam penelitian.

BAB III Metode Penelitian

Pada bab ini menjelaskan tentang teknik atau cara yang digunakan dalam melakukan penelitian. Yang memuat informasi tentang pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, waktu dan

tempat penelitian, definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data.

BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pada bab ini menjelaskan tentang deskripsi data dan pembahasan hasil dari penelitian dan analisis data berupa pengaruh Jumlah Penduduk, Upah terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Lampung tahun 2010-2022.

BAB V Penutup

Pada bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang sesuai dengan hasil penelitian yang ditunjukkan kepada pembaca atau peneliti berikutnya yang akan melakukan penelitian dengan objek atau teori yang sama

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penduduk

1. Pengertian Penduduk

Pertumbuhan penduduk adalah proses keseimbangan yang dinamis antara komponen kependudukan yang dapat menambah dan mengurangi jumlah penduduk. Yang menjadi permasalahan dalam pertumbuhan penduduk adalah pertumbuhan jumlah penduduk di negara yang sedang berkembang. Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi ini dapat menimbulkan berbagai masalah dan hambatan dalam pembangunan ekonomi terutama masalah ketenagakerjaan, karena kemampuan negara sedang berkembang dalam menciptakan lapangan kerja baru sangat terbatas.

Irwan dan suparnoko dalam penelitiannya mengatakan bahwa penduduk memiliki dua peranan dalam pembangunan ekonomi yaitu dari segi permintaan dan yang lain dari segi penawaran. Dari segi permintaan penduduk bertindak sebagai konsumen dan dari segi penawaran penduduk bertindak sebagai produsen. Oleh karena itu, pertumbuhan penduduk yang cepat tidak selalu merupakan penghambat bagi pembangunan ekonomi. Hal ini terjadi jika penduduk mempunyai kapasitas tinggi untuk menghasilkan dan menyerap hasil produksinya.²⁴

Todaro dan Smith menjelaskan bahwa ada tujuhkonsekuensi negative dari jumlah penduduk, yakni berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, pendidikan kesehatan, ketersediaan bahan pangan, lingkungan hidup, serta migrasi internasional, distribusi pendapatan, biasanya dapat di definisikan di dalam kaitannya dengana tingkat rata-rata dari distribusi yang dimaksud.²⁵

²⁴ Ibid, 110

²⁵ Binar Dwiyanto Pamungkas Suprianto dan Julia Zikriana, “Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Tingkat

2. Teori-Teori Kependudukan

a. Aliran Malthusian (Thomas Robert Malthus)

Malthus adalah orang pertama yang mengemukakan tentang penduduk Dalam "*essay on population*". Malthus beranggapan bahwa bahan makanan penting untuk kelangsungan hidup, nafsu manusia tak dapat ditahan dan pertumbuhan penduduk jauh lebih baik dari bahan makanan. Teori Malthus menyebutkan bahwa pertumbuhan penduduk mengikuti deret ukur sedangkan pertumbuhan ketersediaan pangan mengikuti hitung, pada kasus ini dimana terdapat permasalahan meledaknya jumlah penduduk dikota yang tidak di imbangi dengan ketersediaan pangan pun berkurang, hal ini merupakan perimbangan yang kurang menguntungkan jika kita kembali kepada teori Malthus.²⁶

Teori Malthus jelas menekankan tentang pentingnya keseimbangan pertambahan jumlah penduduk menurut deret ukur terhadap persediaan bahan makanan menurut hitung. Teori Malthus tersebut sebetulnya sudah mempersoalkan daya dukung lingkungan dan daya tampung lingkungan. Tanah sebagai suatu komponen lingkungan alam tidak mampu menyediakan hasil pertanian untuk mencapai kebutuhan jumlah penduduk yang terus bertambah dan makin banyak. Daya dukung tanah sebagai komponen lingkungan menurun, karena beban manusia yang makin banyak. Jumlah penduduk seimbang dengan batas ambang lingkungan, agar tidak menjadi beban lingkungan atau mengganggu daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan menampakkan bencana alam berupa banjir, kekeringan, gagal panen, kelaparan, wabah penyakit dan kematian.

Kemiskinan Di Kabupaten Sumbawa Tahun 2010-2015," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 14.2 (2017).

²⁶ Edmund Conway, *50 Gagasan Ekonomi Yang Perlu Anda Ketahui* (Jakarta: Esensi Erlangga Group, 2015), 15.

Menurut pendapatnya, faktor pencegah dari ketidakseimbangan penduduk dan manusia antara lain preventif checks (penundaan perkawinan mengendalikan bahwa hawa nafsu dan pantangan kawin), possible checks (bencana alam, wabah penyakit, kejahatan dan peperangan). Robert Malthus ini mengemukakan beberapa pendapat tentang kependudukan, yaitu:

- 1) Penduduk (seperti juga tumbuhan dan binatang) apabila tidak ada pembatasan akan berkembang biak dengan sangat cepat dan memenuhi dengan cepat beberapa bagian dari permukaan bumi
- 2) Manusia untuk hidup memerlukan bahan makanan, sedangkan laju pertumbuhan makanan jauh lebih hemat (deret hitung) dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk (deret ukur).²⁷

b. Aliran Marsit (Karl & F Angel)

Aliran itu tidak sependapat dengan Malthus bila tidak dibatasi penduduk akan kekurangan makanan) Menurut Marxist tekanan penduduk di suatu negara bukanlah tekanan penduduk terhadap bahan makanan, tetapi tekanan terhadap kesempatan kerja misalnya dinegara kapitalis) Marxist juga berpendapat bahwa semakin banyak jumlah manusia semakin tinggi produk yang dihasilkan, jadi dengan demikian tidak perlu dikatakan pembatasan produk. Negara-negara yang mendukung teori Malthus umumnya adalah negara berekonomi seperti USA, Inggris, Prancis, Australia, Canada, dll. Sedangkan negara-negara yang mendukung teori Marxist adalah negara-negara berekonomi sosialis seperti Eropa Timur, RRC, Korea, Rusia, dan Vietnam. Dengan pegangan Marxist adalah beranjak dari pengalaman bahwa manusia sepanjang sejarah akan dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman beda pandangan Marxist dan Malthus adalah pada "Natural Resource" tidak bisa dikembangkan atau mengimbangi kecepatan pertumbuhan penduduk. Menurut Marxist tekanan penduduk disuatu negara bukanlah tekanan

²⁷ Ibid, 17.

penduduk terhadap bahan makanan, tetapi tekanan terhadap kesempatan kerja. (misalnya di negara kapitalis). Marxist juga berpendapat bahwa semakin banyak jumlah manusia semakin tinggi produk yang dihasilkan, jadi dengan demikian tidak perlu diadakan pembalasan penduduk. Aliran Neo Malthusian (Gareth Hardin & Paul Ehrlich)

Pada abad 20 teori Malthus mulai diperdebatkan kembali. Kelompok ini menyokong aliran Malthus, akan tetapi lebih radikal lagi dan aliran ini sangat menganjurkan untuk mengurangi jumlah penduduk dengan menggunakan cara-cara "preventif check yaitu menggunakan alat kontrasepsi. Tahun 1960an dan 1970an foto-foto telah diambil dari ruang angkasa dengan menunjukkan bumi terlihat seperti sebuah kapal yang berlayar dengan persediaan bahan bakar dan bahan makanan yang terbatas. Pada suatu saat kapal ini akan kehabisan bahan bakar dan bahan makanan tersebut sehingga akhirnya malapetaka menimpa kapal tersebut. Tahun 1871 Ehrlich menulis buku *The Population Bomb* dan kemudian direvisi menjadi *The Population Explosion* berisi yang berisi:

- 1) Sudah terlalu banyak manusia di bumi
- 2) Keadaan bahan makanan sangat terbatas
- 3) Lingkungan rusak sebab populasi manusia meningkat

Aliran ini dilengkapi oleh Meadow (1997) melalui buku *Limit to Growth* The ia menarik hubungan antara variabel lingkungan (penduduk, produksi, pertanian, produksi industri, sumber daya alam) dan polusi. Tapi walaupun begitu, malapetaka tidak dapat dihindari hanya manusia cuma menunggunya, dan membatasi pertumbuhannya sambil mengelola alami dengan baik. Kritik terhadap Meadow umumnya dilakukan oleh sosiolog yang menyindir Meadow karena tidak mencantumkan variabel sosial- budaya dalam penelitiannya. Karen itu Mesarovic dan Pestel (1974) merevisi gagasan Meadow dan mencantumkan hubungan lingkungan antar kawasan.

3. Penduduk Dalam Ekonomi Islam

Dalam pandangan Islam sesungguhnya lebih mendorong kita untuk memiliki keturunan yang berkualitas ketimbang yang kuantitasnya (jumlah) banyak. Kendati dalam satu riwayat, Nabi mengatakan bahwa la bangga dengan umat yang banyak (ana mukasirun bikum al- anbiya") Namun hadis ini tetap harus dibaca dalam konteks kualitas. Umat yang jumlahnya banyak namun tidak berkualitas, alih- alih memberi rasa bangga, yang terjadi justru sebaliknya, merendahkan dan melemahkan. Apa yang kita rasakan saat ini adalah bukti, jumlah umat Islam yang banyak di negeri ini, tidak membuat kita bangga sama sekali sebagai umat Islam. Jumlah yang banyak tidak berkontribusi pada pembangunan peradaban yang damai dan sejahtera. Dalam hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS An-Nisa ayat 9:

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: *"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar."* (QS. An-Nisa:9)

Kesejahteraan merupakan impian dan harapan bagi setiap manusia yang hidup di muka bumi ini, setiap orang tua pasti mengharapkan kesejahteraan bagi anak-anak dan keluarganya, baik itu berupa kesejahteraan materi maupun kesejahteraan spiritual, orang tua selalu berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya, mereka akan bekerja keras, membanting tulang mengerjakan apa saja demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, mereka akan memberikan perlindungan dan kenyamanan bagi keluarganya dari berbagai macam gangguan dan bahaya yang menghadangnya.

Sunarti mengemukakan bahwa salah satu aspek spesifik yang sering digunakan sebagai indikator untuk mengukur kesejahteraan rakyat adalah kependudukan, yang meliputi jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, sebaran dan kepadatan penduduk, migrasi dan fertilitas. Selain itu, Ai-Ghazali juga merumuskan seseorang harus melakukan aktivitas ekonomi untuk menciptakan kesejahteraan bagi dirinya dan keluarganya.²⁸

4. Pemberdayaan Penduduk

Jumlah penduduk yang banyak jika tidak dũmbangi dengan kualitas sumber daya manusia malah akan menjadi beban di suatu negara atau daerah. Jika kualitas penduduk atau kualitas sumber daya manusia berkualitas maka akan dapat membantu untuk mengurangi permasalahan seperti pengangguran yakni melalui pemberdayaan penduduk.

Upaya-upaya pemberdayaan dalam meningkatkan sumber daya manusia guna mengatasi pengangguran adalah dengan melalui pelatihan yang berdasarkan kompetensi yang dibutuhkan, memberdayakan sanggar-sanggar kegiatan belajar yang ada dengan berbagai keterampilan ekonomi produktif, meningkatkan hubungan lembaga pendidikan dan industri sehingga relevansi pendidikan dapat ditingkatkan, memperkuat landasan kultural pendidikan sebagai terapi budaya, dan mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah yang tangguh, serta membangkitkan karsa di tengah-tengah masyarakat. upaya-upaya tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan berbagai pelatihan kurus berdasarkan kompetensi yang dibutuhkan, didahului oleh training needs assessment dengan mensinergikan program yang dirancang dinas pendidikan, organisasi profesi, kalangan industri, dan stakeholders pendidikan yang lain
- b. Memberdayakan sanggar-sanggar kegiatan belajar yang dikelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dengan

²⁸ Amirus Sodiq, 'Konsep Kesejahteraan Dalam Islam', *Equilibrium*, 3.2 (2015), 380-405.

memperluas cakupan program bukan hanya baca, tulis, dan hitung (calistung) dengan berbagai keterampilan ekonomi produktif

- c. Meningkatkan hubungan antara lembaga pendidikan dan industri sehingga relevansi pendidikan dapat ditingkatkan Komtmen Pemda Jabar untuk menjadi pusat perkembangan sekolah kejuruan terus didorong dengan peningkatan penguasaan kecakapan hidup (life skills) di kalangan siswa sehingga mereka bisa menjadi entrepreneur. Memperkuat landasan kultural pendidikan sebagai terapi budaya, yang atas komitmen untuk memelihara eksistensi negara dan bangsa, b) memelihara integrasi nasional yakni keutuhan ideologis Pancasila dan UUD 1945. sosial, dan integrasi teritorial dan c) melaksanakan pembangunan guna mempercepat recovery melalui pendidikan karakter baik melalui jalur sekolah, maupun melalui organisasi kemasyarakatan pemuda.
- d. Meningkatkan skill, knowledge, dan ability aparatur sehingga dapat mewujudkan fungsinya dalam pemberdayaan politik masyarakat, mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah yang tangguh, serta membangkitkan karsa di tengah-tengah masyarakat.²⁹

5. Dampak Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk dalam konteks pembangunan mempengaruhi belanja daerah, jumlah penduduk yang besar bagi pemerintah daerah dipandang sebagai aset modal daerah pembangunan atau sebagai pemacu pembangunan tetapi sekaligus juga sebagai penghambat pembangunan.³⁰ Pertumbuhan penduduk adalah sebuah proses keseimbangan yang dinamis antara komponen kependudukan yang dapat

²⁹ BS Sismennas, *Implementasi Sismennas dalam Pembangunan Daerah* (Jakarta: Lemhanas, 2007).

³⁰ Andri Devita, Arman Delis, dan Junaidi Junaidi, "Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan jumlah penduduk terhadap belanja daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi," *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 2.2 (2014), 63–70

menambah dan mengurangi jumlah penduduk.³¹ Yang menjadi permasalahan dalam pertumbuhan penduduk adalah pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi dapat menimbulkan berbagai masalah dan hambatan dalam pembangunan ekonomi.³² Dengan keadaan yang demikian di memungkinkan pertumbuhan penduduk akan menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah jika dalam penanganannya tidak bisa dilakukan dengan efektif.

Jumlah penduduk yang terlalu banyak atau kepadatan penduduk yang terlalu tinggi akan menjadi penghambat pembangunan ekonomi di negara berkembang. Pendapatan per kapita yang rendah dan tingkat pembentukan modal yang rendah semakin sulit bagi negara berkembang untuk menopang ledakan jumlah penduduk.

Sekalipun output meningkat sebagai hasil teknologi yang Ichib baik dan pembentukan modal, peningkatan ini akan ditelan okch jumlah penduduk yang terlalu banyak. Alhasil, tidak ada perbaikan dalam laju pertumbuhan perekonomian. Penduduk sebagai pemacu pembangunan karena populasi yang lebih besar sebenarnya adalah pasar potensial yang menjadi sumber permintaan akan berbagai macam barang dan jasa yang kemudian akan menggerakkan berbagai macam kegiatan ekonomi sehingga menciptakan skala ekonomi dalam produksi yang akan menguntungkan semua pihak, menurunkan biaya produksi dan menciptakan sumber pasokan atau penawaran tenaga kerja murah dalam jumlah yang memadai sehingga pada gilirannya akan merangsang output atau produksi agregat yang lebih tinggi lagi.

Pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang berarti tingkat kemiskinan akan turun. Selanjutnya dalam jangka panjang penduduk merupakan suatu keuntungan. Simon juga mencatat bahwa,

³¹ Mulyadi, *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 15.

³² Subandi, *Ekonomi Pembangunan* (Bandung: Alfabeta, 2014), 99.

pertumbuhan penduduk juga merangsang pembangunan ekonomi. Semakin besar jumlah penduduk akan mengakibatkan meningkatnya permintaan terhadap barang-barang konsumsi dan selanjutnya akan mendorong "economic of scale" dalam berproduksi, sehingga akan menurunkan biaya produksi.³³ Pemerintah Daerah yang memiliki jumlah penduduk banyak dituntut untuk melakukan pengendalian intern yang baik sebagai pertanggungjawaban kepada publik. Semakin besar ukuran pemerintahan semakin mudah untuk mendapatkan modal eksternal dalam jumlah yang lebih besar, sehingga investor tertarik untuk menanamkan modalnya pada pemerintahan tersebut. Hal ini dikarenakan setiap pemerintah daerah memiliki ukuran yang berbeda.³⁴

David Ricardo berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk yang terlalu besar hingga 2 kali lipat bisa menyebabkan melimpahnya tenaga kerja. Tenaga kerja yang melimpah menyebabkan upah yang diterima menurun, di mana upah tersebut hanya bisa untuk membiayai tingkat hidup minimum (subsistence level) Pada taraf ini, perekonomian mengalami stagnasi (kemandekan) yang disebut "Stationary State".³⁵

B. Pendidikan

1. Pengertian Pendidikan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan

³³ Evi Adriani and Sri Indah Handayani, 'Pengaruh PDRB Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Merangin', *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 8.2 (2017), 1–6.

³⁴ Muhammad Iqbal, Amries Rusli Tanjung, dan Supriono Supriono, "Pengaruh Tingkat Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Belanja Modal, dan Jumlah Penduduk terhadap Kelemahan Pengendalian Intern pada Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten dan Kota Provinsi Riau dan Sumatera Bara)" (Riau University, 2017).

³⁵ Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015), 82.

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.³⁶

Sedangkan menurut guru besar IPB Didin Hafidhuddin, pendidikan merupakan sistem dan cara meningkatkan kualitas hidup dari segala bidang, sehingga sepanjang sejarah hidup umat manusia di muka bumi ini, hampir tidak ada kelompok manusia yang tidak menggunakan sebagai sarana pembudayaan dan peningkatan kualitasnya, meskipun dengan sistem dan metode yang berbeda-beda sesuai dengan taraf hidup dan budaya masyarakat masing-masing. Tujuan akhir dari proses ini adalah terciptanya civil society yang memiliki karakter yang baik (al insan al kamil).³⁷

2. Jalur Pendidikan

Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan yang sesuai dengan tingkat pendidikan. Jalur pendidikan digolongkan menjadi tiga, yaitu:³⁸

- a. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi
- b. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Jalur ini berfungsi sebagai pengganti, penambah dan pelengkap pendidikan formal

³⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 1.

³⁷ Irfan Syauqi Beik dan Laili Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 150.

³⁸ U. H. Saidah, *Pengantar Pendidikan : Telaah Pendidikan Secara Global Dan Nasional* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 210-211.

dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.

- c. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan, yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

3. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan atau jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Tahapan pendidikan terdiri atas empat tahap, yaitu :³⁹

- a. Pendidikan Dasar, diselenggarakan untuk mengembangkan sikap dan kemampuan serta memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat serta mempersiapkan peserta didik yang memenuhi persyaratan untuk memasuki jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar ini berbentuk sekolah dasar (SD) atau bentuk sekolah lain yang sederajat.
- b. Pendidikan menengah, diselenggarakan untuk melanjutkan dan memperluas pendidikan dasar serta mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya serta dapat mengembangkan kemampuan lebih lanjut dalam dunia kerja atau pendidikan tinggi. Pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK), madrasah Aliyah (MA), atau bentuk lain yang sederajat.
- c. Pendidikan tinggi, merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan professional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan

³⁹Ibid, 11.

kesenian. Pendidikan tinggi dapat berbentuk akademik, politeknik, institute, universitas, atau bentuk lain yang sederajat.

Salah satu ukuran untuk tingkat pendidikan penduduk suatu wilayah adalah dengan melihat Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Rata-rata usia lama sekolah (RLS) adalah angka rata-rata tahun yang dihabiskan penduduk berusia produktif yaitu berusia 15 tahun keatas untuk menempuh pendidikan formal.⁴⁰ Nilai ini didapat dari rasio jumlah penduduk yang menyelesaikan jenjang pendidikan dan lama sekolah terhadap jumlah penduduk wilayah tersebut. Lamanya sekolah merupakan ukuran akumulasi investasi pendidikan penduduk. Setiap tahun tambahan sekolah diharapkan mampu membantu meningkatkan kualitas dan pendapatan individu.

4. Pendidikan Dalam Perspektif Islam

Terdapat beberapa istilah bahasa arab yang sering digunakan para ahli dalam memberikan definisi pendidikan islam yakni Al-Tarbiyah Al-Ta dib Dan Al-Tahm. Namun istilah yang sekarang berkembang adalah Al-Tarbiyah Istilah Al-Tarbiyah berasal dari kata rehbb walaupun kata rahh memiliki banyak arti, namun makna dasarnya adalah tumbuh, berkembang, memelihara mengatur, menjaga kelestarian (eksistensinya).

Secara umum, tujuan pendidikan islam yakni menjadikan manusia sebagai insan pengabdian kepada khaliqnya, guna membangun dan mengelola alam semesta. Hal ini, mengacu pada QS Adz-Dzariyaat : 56

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

"Artinya: "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku".

Omar M. Al Tauny dalam buku falsafah At Tarbiyah Al Islamiyyah (Filosofi Pendidikan Islam), mengungkapkan

⁴⁰ Michael P. Todaro, *Pembangunan Ekonomi 2* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2000), 4.

bahwa tujuan asasi pendidikan dalam Islam adalah sebagai berikut:

- a. Untuk membantu membentuk akhlak yang mulia. Dengan demikian, maka akhlakul karimah merupakan jiwa dari setiap pendidikan Islam.
- b. Untuk mempersiapkan anak didik menghadapi kehidupan di dunia dan di akhirat secara sekaligus.
- c. Untuk mempersiapkan anak didik memelihara ruh ilmiah (Scientific Spirit) dan keinginan untuk terus mencari dan menemukan sesuatu (Curiosity)
- d. Mempersiapkan anak didik agar menguasai suatu keahlian tertentu, disesuaikan dengan bakat dan kemampuannya.
- e. Mempersiapkan anak didik untuk memiliki tanggung jawab dalam hidupnya sebagai Allah dan sebagai makhluk sosial.
- f. Mengajak anak didik dalam memahami hikmah (rahasia) penciptaan alam semesta dan upaya memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya dan seoptimal mungkin.

Dengan demikian pendidikan tidak hanya menyangkut aspek material dan keduniaan saja, namun juga aspek spiritual dan berorientasi pada akhirat.

C. Upah

1. Pengertian dan Dasar Hukum Upah

Upah adalah sebagai imbalan dari pengusaha kepada karyawan untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan dan dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan atas dasar suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan serta dibayarkan atas dasar suatu perjanjian antara pengusaha dengan karyawan termasuk tunjangan, baik untuk karyawan itu sendiri maupun keluarganya.⁴¹

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 78 Tahun 2015, Upah adalah hak pekerja/buruh yang

⁴¹ Sonny Sumarsono, *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia & Ketenagakerjaan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2003).

diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dan pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan "

Upah minimum adalah upah terendah yang dijadikan standar oleh pengusaha untuk menentukan upah yang sebenarnya dari pekerja/buruh yang bekerja diperusahaannya. Upah minimum ini umumnya ditentukan oleh pemerintah (Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi/Bupati/Walikota), dan setiap tahun berubah." Penetapan upah minimum di Indonesia dilakukan setiap 39 tahun yang didasarkan pada kehidupan dan kebutuhan tenaga kerja dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Kebutuhan hidup layak yaitu kebutuhan pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik untuk kebutuhan satu bulan. Penetapan upah minimum Provinsi atau Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Gubernur. Penetapan upah minimum dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut :

Keterangan

$$UM_n = UM_t \{UM_t (\text{Inflasi} + \% \Delta PDB_t)\}$$

UM_n = Upah minimum yang akan ditetapkan

UM_t = Upah minimum tahun berjalan

Inflasi = Inflasi yang dihitung dan periode september tahun lalu dan september tahun berjalan

ΔPDB_t = Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto yang dihitung Dari pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto yang mencakup periode kuartal III dan IV tahun sebelumnya dan periode kuartal I dan II tahun berjalan.⁴⁰

2. Teori-Teori Upah

a. Teori Malthus

Sudut pandang kaum klasik bertitik tolak dari sisi penawaran (supply side economies) Tingkat upah sebagai harga penggunaan tenaga kerja juga banyak ditentukan oleh penawaran tenaga kerja dengan sumber utama penawaran tenaga kerjanya adalah penduduk usia kerja. Bila penduduk bertambah, penawaran tenaga kerja juga bertambah, maka hal ini akan menekan tingkat upah. Sebaliknya secara simetris tingkat upah akan naik apabila bila penduduk berkurang, sehingga penawaran tenaga kerja pun berkurang. Dengan asumsi sisi lain usaha untuk menaikkan tingkat upah dalam jangka panjang, diperkirakan orang akan menjadi makmur sehingga ada kecenderungan untuk tidak ragu-ragu mempunyai keluarga besar, Sebaliknya, bila ada usaha untuk menurunkan tingkat upah, maka kemakmuran akan berkurang. Penurunan kemampuan ekonomis ini akan mendorong orang untuk berhemat. Jadi dalam jangka panjang tingkat upah akan naik turun sesuai dengan perubahan tingkat jumlah penduduk⁴²

Jumlah penduduk yang terlalu besar dan tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan kerja akan menyebabkan sebagian dari penduduk yang berada pada usia kerja tidak memperoleh pekerjaan. Kaum klasik seperti Adam Smith, David Ricardo Dan Thomas Robert Malthus berpendapat bahwa selalu ada perlombaan antara tingkat perkembangan output dengan tingkat perkembangan penduduk yang akhirnya dimenangkan oleh perkembangan penduduk. Karena penduduk juga berfungsi sebagai tenaga kerja, maka akan terdapat kesulitan dalam penyediaan lapangan pekerjaan. 42

⁴² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, *Nomor 78 Tahun 2015, Tentang Pengupahan, BAB V, Pasal 43-45.*

b. Teori David Ricardo

Dalam teori ini David Ricardo mengatakan ketika standar umum kehidupan meningkat, upah minimum yang dapat dibayarkan kepada pekerja juga meningkat. Jika penyerapan tenaga kerja ini dikaitkan dengan upah minimum regional (UMR), maka dapat diketahui bahwa ada kecenderungan hubungan negatif upah dengan penyerapan tenaga kerja. Meningkatnya jumlah upah akan menyebabkan pembengkakan pengeluaran industri yang akan menurunkan besaran laba optimum industri tersebut. Tentunya ini akan menghambat industri untuk berkembang, untuk mengatasi permasalahan tersebut tidak jarang suatu industri harus menempuh dengan cara pengurangan penyerapan tenaga kerja atau pemberhentian hubungan kerja (PHK). Hal ini dilakukan semata-mata untuk menghemat pengeluaran dan demi tercapainya laba optimum sektor industri tersebut." 43

c. Teori Jhon Stuart Mills

Salah seorang tokoh mazhab klasik yaitu Mills, berpendapat tentang upah menyimpulkan bahwa tingkat upah juga tidak akan beranjak dari tingkat semula. Menurutnya, dalam masyarakat tersedia dana upah untuk pembayaran upah. Dunia usaha menyediakan sebagian dari dananya yang diperuntukkan bagi pembayaran upah. Pada saat investasi sudah dilaksanakan, jumlah dana tersebut sudah tertentu. Jadi tingkat upah tidak dapat berubah jauh dari alokasi tersebut. Dapat disimpulkan ada kesan pesimisme bahwa tingkat upah hanya akan berkisar pada tingkat yang rendah.

Masa dimana pendapatan ini berkembang secara kebetulan bertepatan dengan terjadinya revolusi industri yang menyerap tenaga kerja secara misal dengan upah rendah. Disamping karena rendahnya keterampilan mereka, hal ini juga karena sikap kurang begitu

menghargainya pemimpin usaha terhadap peranan tenaga kerja.⁴³

d. Teori Kelompok NeoKlasik

Masih termasuk klasik karena sependapat dengan mereka tentang pentingnya kebebasan berusaha. Pembaruan yang diajukan antara lain terletak pada perubahan dalam sikap yang meninggalkan pesimisme. Inti usulan yang diajukan adalah bahwa tingkat upah dapat saja tinggal asal sesuai dengan produk marginalnya. Memang menurut mazhab ini tingkat upah cenderung untuk sama dengan nilai pasar dari produk marginal. Mazhab ini memberi kemungkinan bahwa tenaga kerja pada tingkat mikro tidak homogen. Karena tingkat upah juga tidak sama untuk semua tenaga kerja. Setiap tingkat kualitas tenaga kerja terdapat satu tingkat produk marginal dan satu tingkat upah.

Kualitas tenaga kerja merupakan dasar bagi pencapaian produktifitas. Kualitas ini tergantung atas modal insani yang disikan kedalam diri tenaga kerja. Makin banyak modal yang masuk, makin tinggi kualitasnya, modal yang dimaksud terdiri atas pendidikan latihan, pengalaman kerja dan kesehatan mereka. Jalan pikiran mazhab neoklasik ini masih mendominasi jalan pikiran sekarang. Yang dimana memodifikasi sana-sini sudah barang tentu ada.⁴⁴

e. Teori Mankiw

Dalam teori mankiw yang menjelaskan bahwa kenaikan upah minimum akan mengurangi jumlah tenaga kerja (khususnya yang tidak berpengalaman dan tidak terdidik) yang diminta oleh perusahaan sehingga berpotensi meningkatkan pengangguran.⁴⁵ Teori tersebut

⁴³ Afrida Br, *Ekonomi Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007).

⁴⁴ Ibid, h. 150-151.

⁴⁵ Desi Ajeng Rahayu, 'Pengaruh Tingkat Pendidikan, Upah Minimum Provinsi (UMP), Dan Penanaman Modal Asing (PMA) Terhadap Pengangguran

dapat diartikan dalam kenaikan upah minimum akan mengurangi jumlah tenaga kerja atau meningkatkan pengangguran yang ada, dalam meningkatkan pengangguran maka dengan secara otomatis akan menambah jumlah penduduk miskin di suatu wilayah tersebut.

3. Upah Dalam Ekonomi Islam

Dalam Islam upah disebut juga dengan ujarah yang dihasilkan dari akad ijarah. Menurut ulama Hanafiyah ijarah adalah transaksi terhadap suatu dengan imbalan tertentu yang dibolehkan. Upah (ujrah) adalah bentuk kompensasi atas jasa yang telah diberikan oleh tenaga kerja. Dalam upah didefinisikan secara menyeluruh dalam ayat berikut:

Artinya: "Dan katakanlah: Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan." (QS. At-Taubah, (9), Ayat : 105).⁴⁶

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عِلْمِ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Ayat diatas menjelaskan bahwa menurut konsep Islam, upah terdiri dari dua bentuk, yaitu upah dunia dan upah akhirat. Dengan kata lain, ayat diatas mendefinisikan upah dengan imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi didunia dan imbalan yang berupa pahala di akhirat. Imbalan materi yang diterima seorang pekerja di dunia haruslah adil dan layak, sedangkan

Terdidik Di Pulau Sumatera Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam' (UIN Raden Intan Lampung, 2017).

⁴⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qura'an Dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2007).

imbalan pahala di akhirat merupakan imbalan yang lebih baik diterima oleh seorang muslim dari Tuhan-nya.⁴⁷

Secara umum, Islam tidak memberikan upah berada dibawah tingkat minimum yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan pokok kelompok pekerja. Tetapi islam juga tidak membiarkan adanya kenaikan upah melebihi tingkat tertentu yang ditentukan berdasarkan sumbangan terhadap produksi. Menurut M.A Mannan, kebutuhan pokok yang harus dibayar oleh majikan adalah yang dapat menutup kecukupan hidup dimana standar itu bergantung pada tingkat keadaan Sosio-Ekonomi masyarakat berkaitan. Walaupun Islam menganjurkan adanya upah minimum yang dapat mencukupi kebutuhan pokok seseorang, namun Islam mengakui adanya perbedaan jumlah upah itu sendiri karena ada dua faktor penentu kadar upah yaitu nilai kerja dan kebutuhan pekerja.⁴⁵

Menurut Afzalur Rahman, sebuah negara sebagai wakil Allah di muka bumi diharapkan dapat melakukan pemerataan rezeki terhadap anggota masyarakatnya. Dengan tugas utamanya adalah memperhatikan agar setiap pekerja dalam negara memperoleh upah yang cukup untuk mempertahankan kehidupan yang wajar dan tidak memperbolehkan memberikan upah yang berada dibawah tingkat minimum agar pekerja dapat memenuhi kebutuhan pokoknya.⁴⁶

Berdasarkan konsep dapat disimpulkan bahwa konsep upah dalam islam harus adil dan layak selain adil dan layak, upah/imbalan yang diperoleh dengan maksud seimbang antara materi dan moralitas para tenaga kerja. Konieks ini yang oleh ahli ekonomi barat disebut dengan konsep equal pay for equal job. Sedangkan konsep upah dalam islam harus layak, maka maksudnya adalah kelayakan upah yang diterima oleh pekerja harus dilihat dari tiga aspek, yaitu papan, pangan dan sandang. Artinya hubungan antara majikan dengan pekerja bukan hanya sebatas hubungan formal, tetapi pekerja sudah dianggap

⁴⁷ Murtadho Ridwan, 'Standar Upah Pekerja Menurut Sistem Ekonomi Islam', *Jurnal Equilibrium*, 1.2 (2013), 241-57.

sebagai keluarga majikan Konsep inilah yang membedakan antara konsep upah menurut ekonomi barat dengan konsep upah menurut Ekonomi Islam.⁴⁷ Menurut penjelasan di atas, upah sejatinya sebagai proteksi bagi tenaga kerja maupun bagi suatu perusahaan agar tidak boleh rendah dan tidak terlalu tinggi dan bertemu pada titik keseimbangan pasar tenaga kerja.

4. Jenis-Jenis Upah

Beberapa jenis-jenis upah menurut Zaeni Asyhadie, diantara lain:

a. Upah Nominal

Upah nominal adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara tunai kepada pekerja/buruh yang berhak sebagai imbalan atas pengerahan jasa-jasa atau pelayanannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kerja.

b. Upah Nyata (Riil Wages)

Upah riil adalah uang nyata yang benar-benar harus diterima seorang pekerja/buruh yang berhak. Upah nyata ditentukan oleh daya beli upah tersebut yang akan tergantung dari:

- 1) Besar atau kecilnya jumlah uang yang diterima.
- 2) Besar atau kecilnya biaya hidup yang diperlukan

c. Upah Hidup

Upah hidup adalah upah yang diterima pekerja/buruh relative cukup untuk membiayai hidupnya secara luas, yang bukan hanya kebutuhan pokoknya melainkan kebutuhan sosial keluarganya juga seperti pendidikan, asuransi, rekreasi dan lain-lain.

d. Upah Minimum

Upah minimum adalah upah terendah yang dijadikan standart oleh pengusaha untuk menentukan upah yang sebenarnya dari pekerja/buruh yang bekerja diperusahaannya.

5. Penetapan Upah Minimum

Penetapan upah minimum di Indonesia dilakukan setiap tahun yang didasarkan pada kebutuhan hidup layak dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Kebutuhan hidup layak yaitu kebutuhan pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik untuk kebutuhan satu bulan. Penetapan upah minimum provinsi, kabupaten/kota ditetapkan oleh gubernur.⁴⁸

6. Tujuan Pengupahan

Dengan ditetapkannya upah, maka tujuan dari pemberian upah adalah sebagai berikut:

- a. Ikatan kerja sama, dengan pemberian gaji, terjalinlah ikatan kerja sama formal antara majikan dengan karyawan. Karyawan harus mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik, sedangkan pengusaha atau majikan wajib membayar gaji sesuai dengan perjanjian yang
- b. Kepuasan kerja, dengan balas jasa, karyawan akan dapat memenuhi kebutuhan fisik status sosial dan egoistiknya sehingga memperoleh kepuasan kerja dari jabatannya.
- c. Pengadaan efektif, jika program gaji ditetapkan cukup besar, maka pengadaan karyawan yang qualified untuk perusahaan akan lebih mudah
- d. Motivasi jika balas jasa yang diberikan cukup besar, maka manajer akan mudah memotivasi bawahannya
- e. Stabilitas karyawan, dengan program kompensasi atas prinsip adil dan layak serta eksternal konsistensi yang kompentatif maka stabilitas karyawan lebih terjamin karena turnover relatif kecil.
- f. Disiplin, dengan pemberian balas jasa yang cukup besar maka disiplin karyawan akan semakin baik. Karyawan akan menyadari serta menaati peraturan peraturan yang berlaku di dalam perusahaan.

⁴⁸ *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 78 Tahun 2015, Tentang Pengupahan, BAB IV, Pasal 43-45.*

D. Teori Pengangguran

1. Pengertian Pengangguran

Menurut kamus besar bahasa Indonesia pengangguran adalah keadaan prang-orang yang tidak memiliki pekerjaan.⁴⁹ Dalam standar yang ditentukan secara internasional, yang dimaksud dengan pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan sebagai angkatan kerja, yang secara aktif sedang mencari pekerjaan dengan tingkat upah tertentu, tetapi tidak memperoleh pekerjaan yang diinginkannya.⁵⁰

Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik dalam indikator ketenagakerjaan, pengangguran merupakan penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja.

Pengangguran merupakan kenyataan yang harus dihadapi negara, baik untuk negara maju ataupun negara berkembang.⁵¹ Pengangguran merupakan masalah makro ekonomi yang mempengaruhi manusia secara langsung, karena kehilangan pekerjaan berarti penurunan standar kehidupan dan tekanan psikologis. Sehingga pengangguran menjadi topic yang sering dibicarakan dalam perdebatan politik dan para politisi dalam membantu menciptakan lapangan kerja.⁵²

Pengangguran Terbuka adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja, yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi

⁴⁹ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Cetakan Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka), 36.

⁵⁰ Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Modern* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 13.

⁵¹ Muana Nanga, *Makro Ekonomi (Teori, Masalah Dan Kebijakan)*, Edisi Revi (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005).

⁵² Mankiw, *Pengantar Ekonomi Makro*, Edisi Ke 3 (Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2010).

tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkannya.⁵³ Tingkat pengangguran adalah persentase angkatan kerja yang tidak/belum mendapatkan pekerjaan.⁵⁴

2. Faktor Penyebab Pengangguran

Menurut Sudradjad, pengangguran disebabkan karena tiga faktor, yaitu sebagai berikut⁵⁵ :

- a. Hanya ingin bekerja sebagai pegawai

Hal ini disebabkan karena adanya suatu pandangan yang mengatakan bahwa menjadi pegawai negeri lebih terhormat dibanding dengan pekerjaan lainnya.

- b. Lapangan kerja yang tersedia memerlukan *skill* atau keahlian khusus

Hal ini disebabkan karena adanya suatu pandangan yang mengatakan bahwa menjadi pegawai negeri lebih terhormat dibanding dengan pekerjaan lainnya. Para penganggur sarjana sulit mendapatkan pekerjaan karena persyaratan yang diminta perusahaan tidak sesuai dengan bidang studi yang dimiliki. Persyaratan khusus yang diminta perusahaan antara lain Indeks Prestasi Tinggi, pandai berbahasa Inggris dan komputer, akuntansi, kejujuran dan kedisiplinan dalam bekerja. Sehingga dalam hal ini tidak ada titik temu antara lulusan perguruan tinggi dengan persyaratan yang diminta oleh perusahaan

- c. Tidak ada minat untuk bekerja

Di masyarakat memang terdapat pengangguran yang tidak memiliki minat untuk bekerja. Mereka hidup bermalasan-malasan saja tanpa menghasilkan apa-apa. Tentu mereka hidup bergantung pada orang lain dan hidup dalam keadaan frustrasi.

⁵³ Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Modern (Perkembangan Pemikiran Dari Klasik Hingga Keynesian Baru)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 472.

⁵⁴ Pearhama Raharja and Mandala Manarung, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, Edisi Ke 3 (Jakarta: Fakultas Ekonomi Indonesia, 2008).

⁵⁵ Sudradjad, *Kiat Mengentaskan Pengangguran dan Kemiskinan Melalui Berwirausaha*, Cetakan Ke 4 (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), 7-10.

3. Teori Pengangguran

Ada beberapa teori yang menjelaskan tentang pengangguran di Indonesia

a. Teori Klasik

Teori Klasik menjelaskan bahwa pengangguran dapat dicegah melalui sisi penawaran dan mekanisme harga di pasar bebas supaya menjamin terciptanya permintaan yang akan menyerap semua penawaran. Menurut pandangan klasik, pengangguran terjadi karena misalokasi sumber daya yang bersifat sementara karena kemudian dapat diatasi oleh mekanisme harga.⁵⁶

b. Teori Keynes

Dalam menanggapi masalah pengangguran Teori Keynes mengatakan hal yang berlawanan dengan teori klasik, menurut teori Keynes sesungguhnya masalah pengangguran terjadi akibat permintaan agregat yang rendah. Sehingga terhambatnya pertumbuhan ekonomi bukan disebabkan oleh rendahnya produksi akan tetapi rendahnya konsumsi. Menurut Keynes, hal ini tidak dapat dilimpahkan ke mekanisme pasar bebas. Ketika tenaga kerja meningkat, upah akan turun hal ini akan merugikan bukan menguntungkan, karena penurunan upah berarti menurunkan daya beli masyarakat terhadap barang-barang. Akhirnya produsen akan mengalami kerugian dan tidak dapat menyerap tenaga kerja.⁵⁷

c. Teori Kependudukan dari Malthus

Dalam teori Malthus pengangguran disebabkan karena pertumbuhan penduduk yang cenderung tidak terbatas hingga mencapai batas persediaan makanan, dalam hal ini menimbulkan manusia saling bersaing dalam menjamin kelangsungan hidupnya dengan cara mencari sumber makanan, dengan persaingan ini maka akan ada sebagian manusia yang tersisih serta tidak mampu lagi memperoleh

⁵⁶ T. Ghilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*, (Yogyakarta: Kanisius, 1992), 217.

⁵⁷ *Ibid*, 219

bahan makanan. Pada masyarakat modern diartikan bahwa semakin pesatnya jumlah penduduk akan menghasilkan tenaga kerja yang semakin banyak pula, namun hal ini tidak diimbangi dengan kesempatan kerja yang ada. Kesempatan kerja yang sedikit menyebabkan manusia saling bersaing dalam memperoleh pekerjaan dan yang tersisih dalam persaingan tersebut menjadi golongan penganggur.⁵⁸

4. Jenis-Jenis Pengangguran

Menurut BPS, pengangguran dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu sebagai berikut⁵⁹:

a. Jenis Pengangguran Berdasarkan Penyebabnya

1) Pengangguran Friksional

Pengangguran Friksional adalah pengangguran yang bersifat sementara akibat adanya kendala waktu, informasi, dan kondisi geografis pelamar kerja dan pembuka lamaran pekerjaan. Dapat pula dikatakan pengangguran normal yang terjadi jika ada 2-3% maka dianggap sudah mencapai kesempatan kerja penuh. Menurut Sadono Sukirno pengangguran sebanyak dua atau tiga persen tersebut dinamakan pengangguran normal atau friksional. Para penganggur ini tidak ada pekerjaan bukan karena tidak dapat memperoleh pekerjaan tetapi karena sedang mencari pekerjaan lain yang lebih baik dengan gaji yang lebih tinggi sehingga mendorong pekerja untuk meninggalkan pekerjaannya yang lama dan mencari pekerjaan yang baru. Dalam proses mencari pekerjaan yang baru ini untuk sementara para pekerja tersebut tergolong sebagai pengangguran yang normal.⁶⁰

⁵⁸ Sugianto, Urgensi dan Kemandirian Desa Dalam Perspektif Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 22.

⁵⁹ Amir Machmud, *Perekonomian Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: Erlangga, 2016), 241.

⁶⁰ Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Modern (Perkembangan Pemikiran Dari Klasik Hingga Keynes Baru)*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2000), 8-9.

2) Pengangguran Struktural

Pengangguran struktural adalah keadaan dimana penganggur yang mencari pekerjaan tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditentukan pembuka lapangan kerja. Semakin maju perekonomian suatu daerah, semakin meningkat kebutuhan akan sumber daya manusia yang berkualitas lebih baik dari sebelumnya.

3) Pengangguran Musiman

Pengangguran Musiman adalah keadaan menganggur karena adanya fluktuasi kegiatan ekonomi jangka pendek yang menyebabkan seseorang harus menganggur. Contohnya adalah petani yang menanti musim tanam, dan tukang penjual duren yang menanti musim durian.

4) Pengangguran Siklis

Pengangguran Siklis adalah pengangguran yang menganggur akibat imbas naik turun siklus ekonomi sehingga permintaan tenaga kerja lebih rendah ketimbang penawaran kerja

5) Pengangguran Teknologi

Pengangguran teknologi adalah pengangguran yang ditimbulkan oleh adanya penggantian tenaga manusia oleh mesin-mesin dan bahan kimia.

b. Jenis Pengangguran Berdasarkan Cirinya

1) Pengangguran Terbuka

Pengangguran terbuka merupakan bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan (baik bagi mereka yang belum pernah bekerja sama sekali maupun yang sudah pernah bekerja), atau sedang mempersiapkan suatu usaha. Mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

2) Pengangguran Tersembunyi

Pengangguran Tersembunyi adalah pengangguran yang terjadi karena jumlah pekerja dalam suatu kegiatan ekonomi lebih besar dari yang sebenarnya diperlukan agar dapat melakukan kegiatannya dengan efisien.

3) Pengangguran Bermusim

Pengangguran Bermusim adalah keadaan dimana seseorang menganggur karena adanya fluktuasi kegiatan ekonomi jangka pendek. Sebagai contoh petani yang menanti musim tanam.

4) Setengah Menganggur

Setengah Menganggur adalah mereka yang bekerja dibawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu) dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan. Menurut Safuridar, setengah menganggur ini bukan berarti penganggur, tetapi mereka bekerja. Hanya saja jam kerja mereka yang rendah. Setengah menganggur atau semi pengangguran adalah para pekerja yang jumlah jam kerja lebih sedikit dari yang mereka inginkan (sebagian besar bekerja secara harian, mingguan atau musiman).⁶¹

5. Dampak Negatif Pengangguran

Beberapa dampak negatif dari pengangguran dibedakan menjadi dua aspek, dimana dua aspek tersebut yaitu⁶²:

a. Akibat buruk ke atas kegiatan ekonomi

Tingkat pengangguran yang relatif tinggi tidak memungkinkan masyarakat mencapai pertumbuhan ekonomi yang teguh. Hal ini dapat dengan jelas dilihat

⁶¹ Safuridar, *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Pengangguran Di Kabupaten Aceh Timur* (Jurnal Samudra Ekonomika, Vol.1, No. 1 Maret 201, Fakultas Ekonomi, Universitas Samudra), 6.

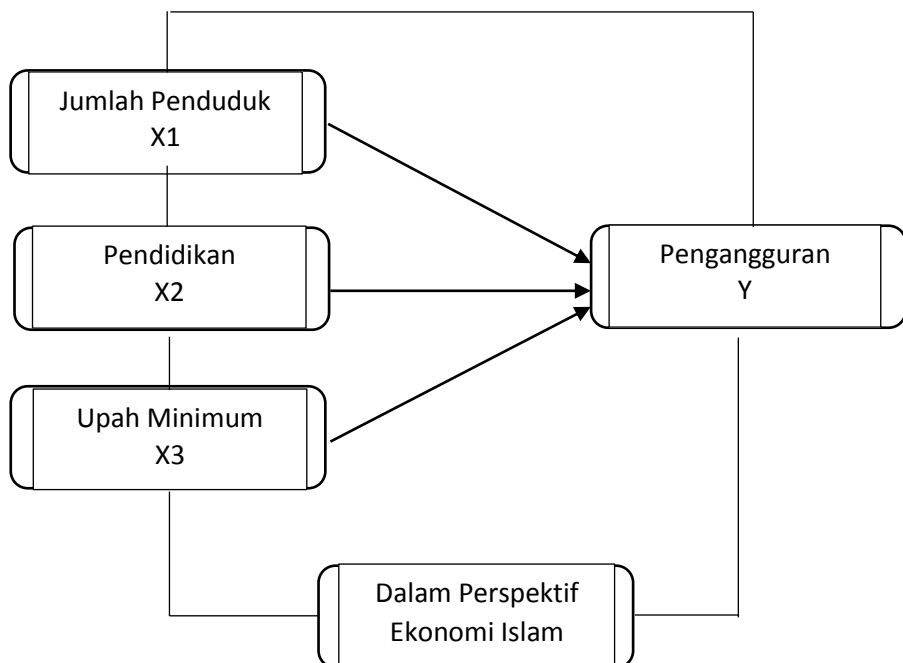
⁶² Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Modern (Perkembangan Pemikiran Dari Klasik Hingga Keynesian Baru)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 472.

dari memperlihatkan berbagai dampak negatif dari masalah pengangguran.

- 1) Pengangguran menyebabkan masyarakat tidak memaksimalkan yang mungkin dicapainya. Hal ini terjadi karena pengangguran bisa menyebabkan pendapatan riil (nyata) yang dicapai masyarakat akan lebih rendah daripada pendapatan potensial (pendapatan yang seharusnya). Oleh karena itu kemakmuran yang dicapai masyarakat pun akan lebih rendah.
 - 2) Pengangguran menyebabkan pendapatan pajak pemerintah berkurang. Pengangguran diakibatkan oleh tingkat kegiatan ekonomi yang rendah, dan dalam kegiatan ekonomi yang rendah pendapatan pajak pemerintah semakin sedikit. Jika penerimaan pajak rendah, dana untuk kegiatan ekonomi pemerintah juga akan berkurang sehingga kegiatan pembangunan pun akan terus menurun.
- b. Akibat buruk ke atas individu dan masyarakat
- 1) Pengangguran menyebabkan kehilangan mata pencaharian dan pendapatan.
 - 2) Pengangguran dapat menyebabkan kehilangan keterampilan. Keterampilan dalam mengerjakan sesuatu pekerjaan hanya dapat dipertahankan apabila keterampilan tersebut digunakan dalam praktek.
 - 3) Pengangguran dapat menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik. Kegiatan ekonomi yang lesu dan pengangguran yang tinggi dapat menimbulkan rasa tidak puas masyarakat kepada pemerintah.
 - 4) Pengangguran yang berkepanjangan menimbulkan efek psikologi yang buruk atas diri penganggur dan keluarganya

E. Kerangka Berpikir

Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran



Dalam penelitian ini penulis memiliki tiga (3) jenis variabel yakni variabel independent atau variabel bebas (X), variabel dependen atau variabel terikat (Y). Dalam pelaksanaanya ada beberapa faktor yang mempengaruhi Pengangguran (Y), yaitu: Jumlah Penduduk (X1), Pendidikan (X2), dan Upah Minimum (X3) yang dikaji dalam perspektif ekonomi islam.

F. Hipotesis Penelitian

a) Jumlah Penduduk

Mengacu pada Teori Malthus pengangguran disebabkan karena pertumbuhan penduduk yang cenderung tidak terbatas. Dalam penelitian terdahulu karya Viky Mouren, Agnes

Lutherani Ch. P. Lapijan , Steeva Y.L Tumangkeng yang berjudul "Pengaruh tingkat pendidikan, pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk terhadap pengangguran di Kabupaten Toraja Utara".⁶³ Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran di Kabupaten Toraja Utara. Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian dari Mukti Hadi Prasaja yang berjudul "Pengaruh investasi asing, jumlah penduduk dan inflasi berpengaruh positif terhadap pengangguran terdidik di Jawa Tengah periode tahun 1980-2011".⁶⁴

Dengan demikian, dari analisis teori dan hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti-peneliti terdahulu, dapat penulis simpulkan bahwa peningkatan jumlah penduduk dapat membuat pengangguran meningkat. Berdasarkan uraian diatas, hipotesis yang dibangun dalam penelitian ini adalah :

Ho : Jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap pengangguran di Provinsi Lampung tahun 2010-2022.

Ha : Jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap pengangguran di Provinsi Lampung tahun 2010-2022.

b) Pendidikan

Mengacu pada teori *human capital* yang menunjukkan hubungan negatif antara tingkat pendidikan dengan tingkat pengangguran. Berdasarkan peneliti terdahulu yang dilakukan Rangga Pramudjasi. T , Juliansyah , Diana Lestari menunjukkan bahwa Pendidikan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran. Sedangkan dalam penelitian Viky Mouren, Agnes Lutherani Ch. P. Lapijan , Steeva Y.L Tumangkeng menunjukkan bahwa tingkat pendidikan dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh

⁶³ Viky Mouren, Agnes Lutherani Ch P Lapijan, dan Steeva Y L Tumangkeng, "Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah Penduduk Terhadap Pengangguran Di Kabupaten Toraja Utara," *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 22.5 (2022), 133–44.

⁶⁴ Mukti Hadi Prasaja, "Pengaruh Investasi Asing, Jumlah Penduduk Dan Inflasi Terhadap Pengangguran Terdidik Di Jawa Tengah Periode Tahun 1980-2011," *Economics Development Analysis Journal*, 2.3 (2013).

negatif dan tidak signifikan terhadap pengangguran di Kabupaten Toraja Utara tahun 2010-2021

Berdasarkan teori dan penelitian terahulu maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut :

Ho : Pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengangguran di Provinsi Lampung tahun 2010-2022.

Ha : Pendidikan berpengaruh signifikan terhadap pengangguran di Provinsi Lampung tahun 2010-2022.

c) Upah Minimum

Mengacu pada Teori Keynes Ketika tenaga kerja meningkat, upah akan turun hal ini akan merugikan, karena penurunan upah berarti menurunkan daya beli masyarakat terhadap barang-barang. Akhirnya produsen akan mengalami kerugian dan tidak dapat menyerap tenaga kerja. Akibatnya pengangguran meningkat.⁶⁵ dan berdasarkan peneliti terdahulu yang dilakukan Rizka Febiana Putri⁶⁶ menunjukkan bahwa variabel independen (upah) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran

Berdasarkan teori dan penelitian terahulu maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut :

Ho : Upah Minimum tidak berpengaruh signifikan terhadap pengangguran di Provinsi Lampung tahun 2010-2022.

Ha : Upah Minimum berpengaruh signifikan terhadap pengangguran di Provinsi Lampung tahun 2010-2022

⁶⁵ *Ibid*, 219

⁶⁶ Rizka Febiana Putri, "Analisis pengaruh inflasi, pertumbuhan ekonomi dan upah terhadap pengangguran terdidik," *Economics Development Analysis Journal*, 4.2 (2015), 175–81.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Jumlah Penduduk berpengaruh signifikan terhadap pengangguran di Provinsi Lampung Tahun 2010-2022, artinya jika jumlah penduduk meningkat maka jumlah pengangguran juga akan meningkat.
2. Pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengangguran di Provinsi Lampung Tahun 2010-2022, artinya pengangguran tidak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan.
3. Upah Minimum berpengaruh terhadap pengangguran di Provinsi Lampung Tahun 2010-2022, artinya jika upah minimum naik maka pengangguran juga akan meningkat.
4. Bekerja merupakan perintah Allah SWT dan menjadi sunah Rasulullah SAW, dalam islam pengangguran merupakan hal yang dilarang oleh Allah SWT, karena islam mengajarkan manusia untuk bekerja sehingga dapat memenuhi kebutuhannya, mencukupi kebutuhan keluarganya, dan membantu sesama manusia.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas dan kesimpulan yang didapat maka, beberapa saran yang dapat diajukan yang berkaitan dengan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah Provinsi Lampung, sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan di masa yang akan datang dalam upaya mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Provinsi Lampung, serta diharapkan lebih memberikkan perhatian khusus terhadap pengangguran yang ada di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung.
2. Bagi Akademisi dan peneliti selanjutnya, dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebuah bahan referensi untuk kegiatan mengajarnya atau penelitiannya. Dikarenakan penelitian ini masih memiliki kekurangan seperti keterbatasan data yang diperoleh dan periode waktu yang digunakan hanya 13 tahun. Sehingga penelitian selanjutnya

diharapkan mampu meneliti dengan menambahkan variabel bebas lainnya dan tahun penelitian, sehingga memberikn hasil penelitian yang lebih baik.

3. Bagi publik, meningkatnya serta tingginya upah minimum di suatu daerah membuat perusahaan mengurangi serta membatasi tenaga kerja yang dipekerjakan, besarnya dan tingginya upah yang harus dibayarkan kepada pekerjanya, hal ini akan berdampak terhadap kurangnya penyerapan tenaga kerja yang menyebabkan banyaknya pengangguran yang terus menerus tanpa adanya penanggulangan atau tindakan dari pemerintah akan mempengaruhi masalah ekonomi lainnya seperti menurunnya pendapatan nasional

DAFTAR RUJUKAN

- Adriani, Evi, and Sri Indah Handayani, 'Pengaruh PDRB Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Merangin', *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 8.2 (2017), 1–6
- Arifianto, Moch Doddy, *Ekonometrika (Esensi Dan Aplikasi Dengan Menggunakan EViews)*, ed. by Novietha I. Sallama (Erlangga, 2012)
- Arifin, Samsul, and Firmansyah Firmansyah, 'Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Kesempatan Kerja Terhadap Pengangguran Di Provinsi Banten', *Jurnal Ekonomi-Qu*, 7.2 (2017)
- Arsyad, Lincolin, *Ekonomi Pembangunan* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015)
- Beik, Irfan Syauqi, and Laili Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)
- Br, Afrida, *Ekonomi Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007)
- Conway, Edmund, *50 Gagasan Ekonomi Yang Perlu Anda Ketahui* (Jakarta: Esensi Erlangga Group, 2015)
- Departemen Agama RI, *Al-Qura'an Dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2007)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002)
- Depi, Depi, Yulmardi Yulmardi, and Hardiani Hardiani, 'Pengaruh Upah, Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesempatan Kerja Terhadap Jumlah Pengangguran Terdidik Di Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2001-2015', *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 2020
- Devita, Andri, Arman Delis, and Junaidi Junaidi, 'Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jambi', *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 2.2 (2014), 63–70
- Dharmakusuma, Sandy, *Trade Off Antara Inflasi Dan Tingkat*

Pengangguran (Gema Stikubank)

- Fitri, Fitri, and Junaidi Junaidi, 'Pengaruh Pendidikan, Upah Dan Kesempatan Kerja Terhadap Pengangguran Terdidik Di Provinsi Jambi', *E-Jurnal Ekonomi Sumberdaya Dan Lingkungan*, 5.1 (2016), 26–32
- Franita, Riska, Andes Fuady Dharma Harahap, and Yani Sukriah, 'Analisa Pengangguran Di Indonesia', *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 6.1 (2019), 88–91
- Gufron, Muhammad Baihaki Hani, and Yuni Prihadi Utomo, 'Analisis Pengaruh Upah Minimum, Pdrb, Jumlah Penduduk Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Jumlah Pengangguran Di Jawa Timur Tahun 2018' (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020)
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik, *Nomor 78 Tahun 2015, Tentang Pengupahan, BAB V, Pasal 43-45*
- Iqbal, Muhammad, Amries Rusli Tanjung, and Supriono Supriono, 'Pengaruh Tingkat Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Belanja Modal, Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kelemahan Pengendalian Intern Pada Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten Dan Kota Provinsi Riau Dan Sumatera Bara' (Riau University, 2017)
- Ishak, K, *Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Pengangguran Dan Inflikasinya Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia*, 2018
- Junjuran, Mochammad Ilyas, and Ajeng Tita Nawangsari, *Pengolahan Data Statistik Dengan Menggunakan EViews Dalam Penelitian Bisnis* (Insan Cendekia Mandiri, 2021)
- Machmud, Amir, *Perekonomian Indonesia Pasca Reformasi*, ed. by Suryadi Saat (Jakarta: Erlangga, 2016)
- Mankiw, *Pengantar Ekonomi Makro*, Edisi Ke 3 (Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2010)
- Mankiw, N Gregory, Imam Nurmawan, and Yati Sumiharti, *Teori Makroekonomi* (Penerbit Erlangga, 2000)
- Mansuri, *Modul Praktikum Eviews 9* (Jakarta: Universitas Borobudur, 2016)

- Marpaung, Juliyanti Maria, Lapeti Sari, and Eriyati Eriyati, 'Pengaruh Migrasi Masuk Dan Upah Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran Di Kota Pekanbaru Tahun 2000-2014' (Riau University, 2017)
- Muafiqie, Humaidah, and Et Al, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Pendekatan Makro Dan Mikro)* (Selat Media)
- Mulyadi, *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014)
- Muslim, Mohammad Rifqi, 'Pengangguran Terbuka Dan Determinannya', *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 15.2 (2014), 171–81
- Nanga, Muana, *Makro Ekonomi (Teori, Masalah Dan Kebijakan, Edisi Revi)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 78 Tahun 2015, Tentang Pengupahan, BAB IV, Pasal 43-45*
- Raharja, Pearhama, and Mandala Manarung, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, Edisi Ke 3 (Jakarta: Fakultas Ekonomi Indonesia, 2008)
- Rahayu, Desi Ajeng, 'Pengaruh Tingkat Pendidikan, Upah Minimum Provinsi (UMP), Dan Penanaman Modal Asing (PMA) Terhadap Pengangguran Terdidik Di Pulau Sumatera Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam' (UIN Raden Intan Lampung, 2017)
- Rahmania, Meri, and Efit tria Wulandari, 'Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pengangguran Terdidik Di Kota Padang', *Eklektik: Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 1.2 (2018), 114–26
- Ridwan, Murtadho, 'Standar Upah Pekerja Menurut Sistem Ekonomi Islam', *Jurnal Equilibrium*, 1.2 (2013), 241–57
- Sadono, Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008)
- Saidah, U. H., *Pengantar Pendidikan : Telaah Pendidikan Secara Global Dan Nasional* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)
- Sismennas, BS, *Implementasi Sismennas Dalam Pembangunan Daerah* (Jakarta: Lemhanas, 2007)

Sodiq, Amirus, 'Konsep Kesejahteraan Dalam Islam', *Equilibrium*, 3.2 (2015), 380–405

Statistik Indonesia, Badan Pusat Statistik Indonesia

Subandi, *Ekonomi Pembangunan* (Bandung: Alfabeta, 2014)

Suhadi, Fajar Rini, and Eni Setyowati, 'Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan, Upah Minimum, Dan PDRB Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi Jawa Barat', *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 10.2 (2022) <<https://doi.org/10.37676/ekombis.v10i2.2144>>

Sukirno, Sadono, *Makro Ekonomi Modern* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006)

———, *Makro Ekonomi Modern (Perkembangan Pemikiran Dari Klasik Hingga Keynesian Baru)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)

Sumarsono, Sonny, *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia & Ketenagakerjaan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2003)

Suprayitno, Iswahyudi Joko, Moh Yamin Darsyah, and Ujiati Suci Rahayu, 'Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Jumlah Pengangguran Di Kota Semarang', in *PROSIDING SEMINAR NASIONAL & INTERNASIONAL*, 2017, 1

Suprianto, Binar Dwiyanto Pamungkas, and Julia Zikriana, 'Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Sumbawa Tahun 2010-2015', *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 14.2 (2017)

Todaro, Michael P., *Pembangunan Ekonomi 2* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2000)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 1

Zahroh, Sofiatuz Zahroh, 'Analisis Pengaruh PDRB, Angkatan Kerja, Dan Upah Minimum Terhadap Pengangguran Di Kota Malang', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 5.2 (2017)